

**STUDI KOMPARATIF LEMBAGA PERADILAN ADMINISTRASI
NEGARA ANTARA WILĀYAH AL-MAZĀLIM DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN ISLAM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(PTUN) DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
OLEH:
MUHAMAD FATIH NASRULLAH
NIM: 13360005

PEMBIMBING:
1. **VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.**
NIP: 19710802 200604 2 001

2. **UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
NIP: 19730825 199903 1 004

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Ketika dilaksanakannya sistem pemerintahan Islam, kekuasaan kehakiman perlahan dilembagakan dan diklasifikasikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Lembaga peradilan yang berfungsi menyelesaikan sengketa antara rakyat dan penguasa dikenal dengan istilah *Wilāyah al-Mazālim*. Pada masa setelahnya, Negara Indonesia turut mewujudkan adanya peradilan administrasi yang dikenal dengan nama Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam mewujudkan fungsi kontrol yuridisnya, *Wilāyah al-Mazālim* dan PTUN memiliki batasan kompetensi dan kedudukan yang berbeda dalam sistem hukum negaranya masing-masing.

Penelitian ini mencari bagaimana kedudukan dan kompetensi lembaga peradilan administrasi negara, baik yang dimiliki oleh *Wilāyah al-Mazālim* maupun PTUN di Indonesia; serta persamaan dan perbedaan kedudukan dan kompetensi di antara kedua lembaga peradilan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deduktif-komparatif, berupa penelitian pustaka dengan rujukan primer buku *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyyah* serta peraturan perundang-undangan seputar PTUN di Indonesia, yakni UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Diperoleh hasil bahwa kedudukan *Wilāyah al-Mazālim* dapat dipimpin langsung oleh khalifah, diwakilkan atau kombinasi dari keduanya. Objek sengketanya ialah kesewenang-wenangan (*al-Zulmu*) dalam arti luas, yakni penyimpangan dari pejabat, atau orang-orang yang memiliki kekuatan atau pengaruh, baik berupa tindakan maupun kebijakan, mencakup perkara administrasi negara, beberapa perkara pidana, perkara kemaslahatan umum, perkara hak uji materiil hingga perkara pemberhentian kepala negara. Kedudukan PTUN berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, baik secara organisasi, administrasi dan finansial. Objek sengketa dari PTUN terbatas kepada Keputusan TUN sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009 dan telah diperluas dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014. Persamaannya, keduanya merupakan lembaga peradilan dalam sistem hukum negaranya masing-masing yang berwenang menyelesaikan sengketa antara penguasa dan rakyatnya. Perbedaannya, *Wilāyah al-Mazālim* secara struktural berpotensi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding badan peradilan lainnya, sedangkan kedudukan PTUN berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. *Wilāyah al-Mazālim* memiliki kompetensi absolut yang sangat luas, mencakup keseluruhan perkara administrasi negara, sedangkan kompetensi absolut PTUN setelah diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014 masih menyisakan “ruang hampa” dalam perkara administrasi negara yang belum bisa disentuh oleh lembaga peradilan manapun. Ketidaktepatan kedudukan dan pembatasan kompetensi PTUN di Indonesia mengakibatkan fungsi penegakan keadilan melalui sistem PTUN menjadi sulit diwujudkan.

Kata Kunci: Mazhalim, Peradilan, Pemerintahan Islam, Kedudukan, Kompetensi, Administrasi Negara, Tata Usaha Negara.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Fatih Nasrullah

Lamp :-

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Fatih Nasrullah

NIM : 13360005

Judul : **STUDI KOMPARATIF LEMBAGA PERADILAN
ADMINISTRASI NEGARA ANTARA *WILAYAH AL-
MAZALIM* DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DI
INDONESIA**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Rabi' al-Awwal 1439 H
21 November 2017 M

Pembimbing I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19710802 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614, Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Fatih Nasrullah

Lamp :-

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Fatih Nasrullah

NIM : 13360005

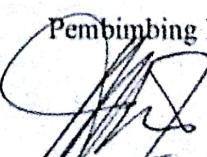
Judul : **STUDI KOMPARATIF LEMBAGA PERADILAN
ADMINISTRASI NEGARA ANTARA *WILAYAH AL-
MAZALIM* DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DI
INDONESIA**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Rabi' al-Awwal 1439 H
21 November 2017 M

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhamad Fatih Nasrullah

NIM : 13360005

Semester : IX

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "**STUDI KOMPARATIF LEMBAGA PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA ANTARA WILAYAH AL-MAZALIM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DI INDONESIA**" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Safar 1439 H
16 November 2017 M



NIM: 13360005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-565/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KOMPARATIF LEMBAGA PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA ANTARA WILAYAH AL-MAZALIM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD FATIH NASRULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13360005
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Desember 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Vita Fitiah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Pengaji I

Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Pengaji II

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003



MOTTO

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَنْهَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ
هُوَ الْعَفُورُ الرَّجِيمُ (الرّّمر: 53)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيُسْتَخْلَفُوهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حُوْفِهِمْ أَمْمًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ
إِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (التور : 55)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

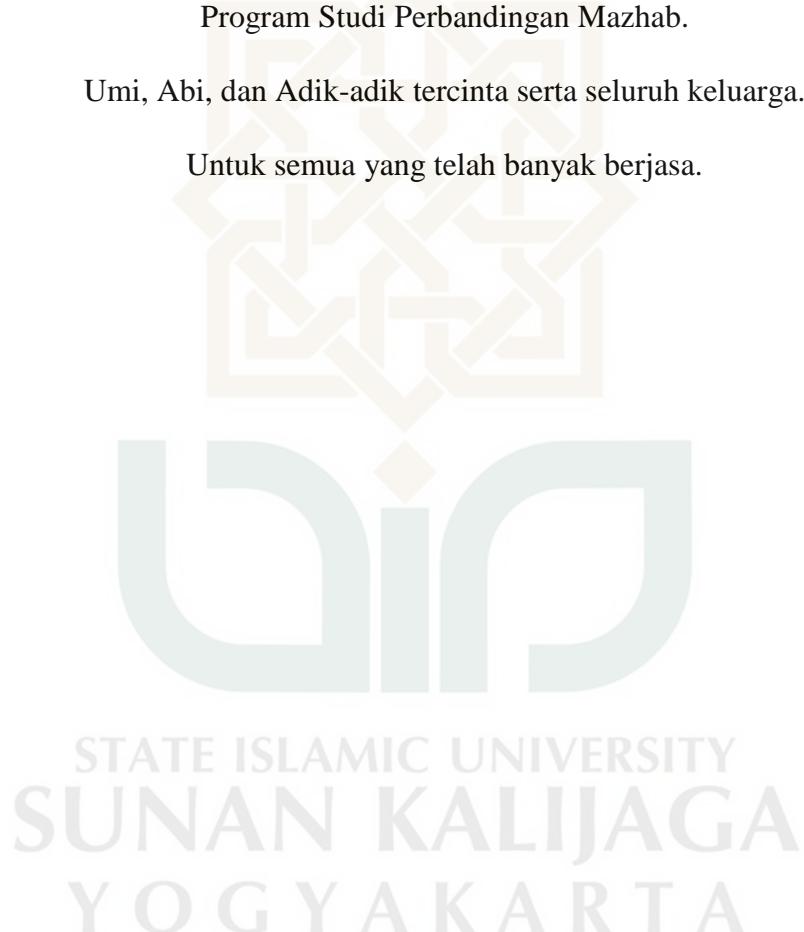
Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Program Studi Perbandingan Mazhab.

Umi, Abi, dan Adik-adik tercinta serta seluruh keluarga.

Untuk semua yang telah banyak berjasa.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
بَ	Bā'	b	be
تَ	Tā'	t	te
سَ	Sā'	ś	es (dengan titik di atas)
جَ	Jīm	j	je
هَ	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خَ	Khā'	kh	ka dan ha
دَ	Dāl	d	de
ذَ	Zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
رَ	Rā'	r	er
زَ	Zai	z	zet
سِ	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
خ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	.	apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

عَدَّة	ditulis	'iddah
مُتَعَّدِّدَين	ditulis	muta'aqqidin

C. Ta' marbūtah

1. Bila dimatikan ditulis “h”

جزية	ditulis	jizyah
------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammeh ditulis “h”

زكاة الفطر	ditulis	zakāh al-fitrī
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ó	Fathah	ditulis	a
ø	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif → contoh: جاهليّة	ditulis	ā → jāhiliyyah
fathah + alif → contoh: يسعي	ditulis	ā → yas'ā
kasrah + ya' mati → contoh: كريم	ditulis	ī → karīm
dammah + wāwu mati → فروض	ditulis	ū → furūd

F. Vokal Rangkap

fatḥah + ya' mati → contoh: بَيْنَكُمْ	ditulis	ai → bainakum
fatḥah + wāwu mati → contoh: قَوْلُ	ditulis	au → qaulun

G. Huruf Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun syamsiyyah; contoh:

القلم	ditulis	al-qalamu
الشمس	ditulis	al-syamsu

H. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ أَلَا رَسُولٌ	ditulis	wa mā Muḥammadun illā rasūl
-------------------------------	---------	-----------------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين،أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل
وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., teladan terbaik bagi seluruh mahluk.

Atas karunia dan rahmat Allah swt., doa dan bantuan dari banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**STUDI KOMPARATIF LEMBAGA PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA ANTARA WILAYAH AL-MAZALIM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DI INDONESIA**".

Penyusun telah berusaha maksimal dalam menyelesaikan skripsi ini, akan tetapi tentunya skripsi ini masih jauh dari kata baik, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Penyusun berharap agar kedepannya terdapat kritik dan masukan yang membangun untuk skripsi ini.

Selama proses penyusunan, penyusun telah banyak menerima bantuan banyak pihak. Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

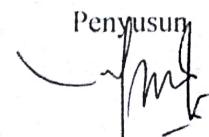
1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof.

Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
3. Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag.
4. Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Gusnam Haris S.Ag., M.Ag.
5. Dosen Penasehat Akademik Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. yang telah membimbing sejak awal proses perkuliahan.
6. Dosen Pembimbing skripsi, Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberi masukan kepada penyusun.
7. Staf Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah banyak membantu dalam proses administrasi.
8. Segenap dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen lainnya yang telah berjasa menyampaikan ilmu kepada penyusun.
9. Kedua Orangtua tercinta, Abi M. Adhi Maretnas Harapan dan Umi Noor Hendrawati yang telah memberikan segala yang terbaik untuk anaknya.
10. Kepada seluruh adik-adik, Afif, Hanif, Faizah dan Latifah, serta segenap keluarga besar yang telah membantu dan menyemangati.
11. Kepada segenap guru dan teman ngaji, serta seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh pihak,
baik penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya. Hanya kepada Allah
Swt. penyusun memohon ampunan dan petunjuk.

Yogyakarta, 25 Muharram 1439 H
15 Oktober 2017 M

Penyusun


Muhamad Ratih Nasrullah

NIM: 13360005



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM <i>WILAYAH AL-MAZALIM</i> DALAM	
SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM	21
A. Pengertian <i>Wilayah al-Mazalim</i>	21

B. Dasar Hukum Pembentukan <i>Wilayah al-Mazālim</i>	25
C. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan <i>Wilayah al-Mazālim</i>	30
D. Kedudukan <i>Wilayah al-Mazālim</i>	40
E. Kompetensi <i>Wilayah al-Mazālim</i>	43

BAB III TINJAUAN UMUM PERADILAN TATA USAHA

NEGARA (PTUN) DI INDONESIA	56
A. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara	56
B. Dasar Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia	61
C. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia	65
1. Masa Kolonial Hindia Belanda	65
2. Masa Pendudukan Jepang	67
3. Masa Setelah Kemerdekaan	67
D. Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia	76
E. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia	80

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN LEMBAGA PERADILAN

ADMINISTRASI NEGARA	91
A. Analisis Perbandingan Kedudukan	91
B. Analisis Perbandingan Kompetensi	96
C. Persamaan dan Perbedaan	108

BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	I
DAFTAR TERJEMAH TEKS ARAB	I
BIOGRAFI TOKOH	V
<i>KITAB AL-AHKĀM AL-SULTĀNIYYAH WA AL-WILĀYAH</i>	
<i>AL-DĪNIYYAH</i>	VIII
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	XXVII
CURRICULUM VITAE	XXXIX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara konsekuensi dari terbentuknya suatu kelompok masyarakat ialah diperlukannya hukum yang mengatur mereka dan hakim yang akan menegakkannya. Pada awal perkembangan hidup manusia, pihak yang paling kuatlah yang memerintah dan menegakkan hukum atas rakyat lainnya. Tidak jarang perselisihan diselesaikan melalui adu kekuatan dan senjata. Tata kelola hukum dan pemerintahan semakin teratur seiring berkembangnya peradaban manusia. Menjelang datangnya Islam misalnya, dalam berperkara dikenal bentuk penyelesaian damai dengan mengangkat *Hakam* (juru damai-juru pisah).¹

Ketika dilaksanakannya sistem pemerintahan Islam di Madinah, Muhammad ibn Abdullah tampil sebagai *Qādi* yang menggantikan posisi *Hakam*. Kekuasaan kehakiman kemudian dilembagakan dan diklasifikasikan sesuai dengan tugas dan fungsinya seiring kasus posisi yang semakin beragam termasuk hubungan antara rakyat dan penguasa. Lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perkara tersebut dikenal dengan istilah *Wilāyah al-Mazālim*.² Ia berfungsi untuk membela hak-hak rakyat yang dizalimi oleh pejabat atau keluarganya, mulai dari pejabat tertinggi hingga pejabat terendah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

¹ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahin Di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. xvi.

² Dalam beberapa referensi disebut dengan istilah lain, terdapat perbedaan arti namun menunjuk kepada maksud yang sama. Di antaranya ialah, *Qaḍā al-Mazālim* dan *Mahkamah al-Mazālim*. Penjelasan seputar perbedaan arti dari istilah tersebut dijelaskan dalam bab berikutnya.

Penyelesaian kasus-kasus yang menjadi objek *Wilāyah al-Mazālim* telah dimulai sejak zaman Rasulullah saw., namun belum dibentuk lembaga khusus yang menanganiinya. Kasus yang terkenal adalah persengketaan antara Zubair bin Awwam (salah seorang keluarga Nabi Muhammad saw.) dengan seorang lelaki dari kalangan Ansar. Lembaga ini juga belum didirikan pada masa kekhilafahan para *al-Khulafā al-Rāsyidūn*, walaupun beberapa kasus *al-Mazālim* disebutkan telah muncul pada masa ini. Hal ini dikarenakan manusia masih memiliki moral yang tinggi, sehingga kezhaliman pejabat/keluarganya terhadap rakyat jarang ditemukan. Khalifah pertama yang menyediakan waktu secara khusus menangani kasus-kasus *al-Mazālim* adalah Abdul Malik bin Marwan.³

Kedudukan pengadilan ini makin kuat di era pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Semasa kekuasaan Umawiyah, peradilan *al-Mazālim* ini biasanya diketuai oleh khalifah sendiri.⁴ Selanjutnya ada beberapa khalifah yang juga menjalankan peran dalam menangani kasus-kasus *al-Mazālim*, diantaranya ialah al-Mahdi, al-Hadi, Harun al-Rasyid, al-Ma'mun, dan khalifah terakhir Bani Abbasiyah yang melakukannya adalah al-Muhtadi.⁵

Setelah itu eksistensi dari peradilan *al-Mazālim* tidak terlalu jelas disebutkan dalam buku-buku sejarah peradilan Islam. Beberapa pernyataan yang dapat

³ Tgk. H. Helmi, "Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dalam Islam (Studi Komparatif antara Lembaga al-Mazhalim dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia)," *Jurnal Al-Mizan*, Vol. I(I) (2013), hlm. 71.

⁴ Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 39.

⁵ Abu al-Hasan 'Ali ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyah al-dīniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 78.

membantu ialah menurut Tgk. Helmi Peradilan *al-Mazālim* masih tetap eksis hingga runtuhnya dinasti Islam terakhir, yaitu dinasti Usmaniyyah di Turki pada tahun 1924. Sejak saat itu, masing-masing negara memiliki kebijakan tersendiri terhadap persoalan sejenis.⁶ Menurut Zafir al-Qasimi, di beberapa negeri muslim dijumpai kemiripan antara *Wilāyah al-Mazālim* dengan apa yang disebut sebagai peradilan administrasi saat ini, sebagaimana di Mesir disebut dengan *Majlīs al-Daulah*, di Lebanon dengan *Majlīs al-Syūrā*, dan di Yordania dengan *Mahkamah al-‘Adl al-‘Ulyā*.⁷

Di benua Eropa muncul gagasan-gagasan dalam rangka membatasi kesewenang-wenangan para penguasanya. Ada dua konsep besar yang berkembang hingga saat ini, yaitu konsep *rechtsstaat* di Eropa kontinental dan konsep *rule of law* di negara-negara Anglo Saxon. Terkait adanya lembaga peradilan administrasi yang berdiri secara terpisah dan mandiri maka hanya konsep *rechtsstaat* yang mewujudkannya. Namun secara formal, istilah negara hukum, *rechtsstaat* ataupun *rule of law* pada dasarnya mempunyai arah yang sama yaitu mencegah kekuasaan absolut demi perlindungan hak asasi.⁸

Negara Indonesia sebagai negara yang banyak terpengaruh konsep *rechtsstaat*-akibat penjajahan Belanda, turut mewujudkan adanya peradilan administrasi yang

⁶ Tgk. H. Helmy, “Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dalam Islam (Studi Komparatif antara Lembaga al-Mazhalim dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia),” *Jurnal Al-Mizan*, Vol. I(I) (2013). hlm. 72.

⁷ Zāfir al-Qāsimi, *Nizām al-Hukmi fī al-Syarī’ati wa al-Tārikhi al-Islāmi*, (Beirut: Dār al-Nafātisy, 1987), hlm. 555.

⁸ Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis dan Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 33.

terpisah dan berdiri sendiri. Lembaga tersebut dikenal dengan nama Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia berfungsi memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum) kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara.

Seiring perkembangannya, PTUN mengalami beberapa kendala dalam menjalankan fungsinya. Di tahun 2016, PTUN tingkat pertama se-Indonesia menjadi lingkungan peradilan yang paling sedikit menerima perkara dengan total perkara yang masuk sebanyak 2.022 perkara dari total 3.838.152 perkara, atau setara dengan 0,05% perkara masuk tingkat pertama nasional.⁹ Menurut Yos Johan Utama, terjadi kegagalan sistemik, substansial dan prosedural pada sub-sub sistem dalam PTUN di Indonesia¹⁰ mulai dari penerimaan perkara¹¹, penanganan perkara¹² hingga putusan dan pelaksanaan putusan.¹³ Sistem PTUN juga menerima hambatan dari

⁹ Pokja Laporan Tahunan MARI, *Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2017), hlm 86.

¹⁰ Yos Johan Utama, “Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrasi Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1 (2007), hlm. 40-41.

¹¹ Berupa ketidakjelasan makna beberapa istilah untuk menentukan perkara yang masuk kompetensi PTUN, tenggang waktu pengajuan gugatan yang tidak akomodatif, ketidakefektifan mekanisme penundaan KTUN yang disengketakan dan kegagalan mengupayakan sistem yang berorientasi kepada penekanan waktu dan biaya berperkara.

¹² Berupa tidak adanya instrumen sistem peradilan singkat, ketidaadaan mekanisme perdamaian, ketidakadilan dalam pengenaan sanksi, pembatasan nilai gantirugi dan kompensasi, ketidaktajaman isi putusan, ketidakjelasan pengertian beberapa istilah hukum dalam mekanisme pengelolaan perkara dan tugas juru sita

¹³ Berupa tidak adanya instrumen pemaksa serta ketiadaan sistem penyelesaian pelaksanaan putusan PTUN apabila terjadi perubahan kondisi hukum setelah putusan dijatuhkan.

faktor-faktor eksternal.¹⁴ Menurut Priyatmanto Abdoellah, ruang lingkup kompetensi absolut PTUN saat ini sangat terbatas. Pembatasan tersebut antara lain mencakup: ruang lingkup objek sengketa TUN terbatas pada keputusan tertulis dan objek sengketa intern, ruang lingkup subjek sengketa TUN terbatas pada subjek sengketa ekstern serta kriteria tergugat yang tidak mencakup semua badan/pejabat publik dan selain badan/pejabat publik yang melaksanakan urusan pemerintahan, dan prosedur beracara dan hak-hak pencari keadilan seperti pembatasan tenggang waktu gugatan, ganti rugi, kompensasi dan rehabilitasi.¹⁵

Adanya berbagai problem kepada akses ke keadilan tercermin dari rendahnya perkara yang masuk. Fenomena tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalkan pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap hukum dan/atau faktor kekurangpercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pengadilan. Namun faktor-faktor tersebut bersifat abstrak sehingga perlu penelitian lanjutan. Faktor riil yang dihadapi PTUN saat ini adalah ketidaktepatan kedudukan dan pembatasan kompetensi oleh peraturan perundang-undangan. Kedua faktor tersebut dapat menimbulkan kegagalan fungsi sistem PTUN dalam menjalankan perannya sebagai akses ke keadilan. PTUN seharusnya dapat menciptakan produk putusan yang adil dan memenuhi harapan pencari keadilan, sebagaimana tujuannya yang terungkap dalam Penjelasan UU No. 5 Tahun 1986: “Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha

¹⁴ Berupa inkonsistensi sistem PTUN dengan sistem peradilan lainnya terutama dengan peradilan umum, beberapa prinsip/asas Hukum Administrasi Negara yang tidak mendukung, sistem PTUN yang rentan terhadap perubahan struktur ketatanegaraan, dan sikap, pemahaman, persepsi hukum dari pejabat TUN yang tidak/kurang menghormati keberadaan PTUN sebagai akses ke keadilan.

¹⁵ Priyatmanto Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan PTUN: Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 281.

Negara itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara.”¹⁶

Upaya perbaikan terus dilakukan, setidaknya terlihat dari UU tentang PTUN yang telah diubah hingga tiga kali perubahan serta diundangkannya UU tentang Administrasi Pemerintahan yang merupakan hukum materiil dari sistem PTUN. Dalam upaya perbaikannya, penyusun merasa tertarik untuk melakukan perbandingan dengan lembaga peradilan administrasi negara lainnya, yaitu *Wilāyah al-Mazālim* di dalam sistem pemerintahan Islam.

Wilāyah al-Mazālim dan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai alat kontrol hukum terhadap aparatur penyelenggara pemerintahan. Namun dalam mewujudkan fungsi kontrol yuridis tersebut, *Wilāyah al-Mazālim* dan PTUN di Indonesia memiliki kompetensi dan kedudukan yang berbeda dalam sistem tata hukum negaranya yang mempengaruhi kinerja kedua lembaga dalam menjalankan fungsinya. Penyusun bermaksud untuk meneliti lebih jauh lagi seputar persamaan dan perbedaan kedudukan dan kompetensi yang dimiliki oleh kedua lembaga peradilan tersebut.

B. Pokok Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini ialah:

¹⁶ Penjelasan UU No. 5 Tahun 1986 bagian I alinea ke-11.

1. Bagaimana kedudukan dan kompetensi lembaga peradilan administrasi negara, baik yang dimiliki oleh *Wilayah al-Mazālim* maupun Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia;
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan kedudukan dan kompetensi lembaga peradilan administrasi negara antara *Wilayah al-Mazālim* dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan kedudukan dan kompetensi lembaga peradilan administrasi negara, baik yang dimiliki oleh *Wilayah al-Mazālim* maupun Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia;
- b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan kedudukan dan kompetensi lembaga peradilan tata usaha negara antara *Wilayah al-Mazālim* dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia.

2. Kegunaan

a. Kegunaan teoretis

- 1) Memberi kontribusi ilmu dan informasi terhadap khazanah ilmu pengetahuan di bidang Peradilan Administrasi Negara;
- 2) Memberi sumbangan pemikiran bagi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, yakni melakukan perbandingan dengan Lembaga Peradilan Administrasi Negara lainnya.

b. Kegunaan praktis

- 1) Menjadi salah satu referensi bagi kajian ilmu pengetahuan, terutama kajian Ilmu Hukum di bidang Peradilan Administrasi Negara;
- 2) Menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi dan mengkaji hal-hal yang belum termuat dalam penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Hingga disusunnya penelitian ini terdapat satu penelitian yang melakukan studi perbandingan antara *Wilāyah al-Mazālim* dan PTUN di Indonesia, yaitu artikel Tgk. H. Helmy dengan judul “Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dalam Islam (Studi Komparatif antara Lembaga Al-Mazhalim dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia)¹⁷. Penelitian bersifat deskriptif-komparatif, dengan melakukan perbandingan secara umum antara Lembaga *al-Mazālim* dan PTUN di Indonesia. Secara praktis sistem PTUN tidak dapat berfungsi sebagaimana Lembaga *al-Mazālim*. Hal ini dikarenakan terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan pembatasan gerak dari PTUN sehingga kompetensinya tidak seluas Lembaga *al-Mazālim*.

Penelitian lain ialah artikel Lomba Sultan dengan judul “Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia”.¹⁸ Artikel tersebut mengkaji eksistensi kekuasaan kehakiman dalam Islam dan aspek-aspek yang dapat

¹⁷ Tgk. H. Helmy, “Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dalam Islam”.

¹⁸ Lomba Sultan, “Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia,” *Jurnal Al-Umm*, Vol. 13 (2013).

diaplikasikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Disebutkan bahwasannya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan kehakiman terutama *Wilāyah al-Hisbah* dan *Wilāyah al-Mazālim* dapat ditegakkan dengan baik dan selaras dengan rasa keadilan masyarakat. Kedua lembaga tersebut dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia melengkapi empat lembaga peradilan yang ada guna mengatasi carut marut penegakan hukum dan keadilan dapat terpenuhi sesuai harapan masyarakat.

Terdapat pula penelitian yang membahas PTUN di Indonesia secara khusus. Artikel Yos Johan Utama dengan judul “Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu Akses Warga Negara untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrasi Negara”.¹⁹ Dijelaskan bahwa sub-sub sistem dalam PTUN tidak memenuhi beberapa karakteristik utama yang mengakibatkan sistem PTUN kurang mampu untuk menjalankan perannya sebagai akses ke keadilan. PTUN mengalami malfungsi pada subsistem penerimaan perkara, pengelolaan perkara, putusan, pelaksanaan putusan, dan diperparah dengan adanya faktor-faktor eksternal yang kurang mendukung fungsi PTUN sebagai akses ke keadilan.

Skripsi Siti Zubaedah Agustina Lubis dengan judul “Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Hukum Tata Negara”.²⁰ Menjelaskan seputar kedudukan PTUN sebagai salah satu pelaksana

¹⁹ Yos Johan Utama, “Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrasi Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1 (2007).

²⁰ Siti Zubaedah Agustina Lubis, “Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Hukum Tata Negara,” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2006).

kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan PTUN dalam Undang-Undang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahamah Agung.

Disamping penelitian yang telah disebutkan, terdapat pula buku-buku yang membahas seputar *Wilāyah al-Mazālim* atau PTUN secara terpisah yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Dari penelaahan pustaka yang telah dilakukan, penyusun melihat bahwa penelitian ini memiliki kesamaan objek dan metodologi penelitian dengan artikel Tgk. H. Helmy. Akan tetapi dalam artikel tersebut pembahasannya tidak secara spesifik membahas perbandingan kedudukan dan kompetensi kedua lembaga. Artikel tersebut juga belum menjadikan peraturan perundang-undangan terbaru berkaitan dengan administrasi negara sebagai salah satu unsur pembahasannya.

E. Kerangka Teoretik

Dalam menganalisis kompetensi dan kedudukan *Wilāyah Al-Mazālim* dan PTUN di Indonesia, penyusun menggunakan dua teori sebagai berikut:

1. Konsep Nomokrasi Islam

Islam adalah agama yang sempurna, berupa kesatuan yang mencakup ajaran-ajaran atas seluruh aspek kehidupan termasuk konsep negara. Dalam hal ini, Azhary menjelaskan bahwa predikat yang tepat untuk konsep negara dalam Islam ialah nomokrasi (Islam) dan bukan teokrasi.²¹ Menurut KBBI, Teokrasi

²¹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 86.

adalah cara memerintah negara berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah negara, hukum negara yang berlaku adalah hukum Tuhan, pemerintahan dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan.²²

Predikat Teokrasi atau lembaga kekuasaan rohani lebih tepat dikaitkan dengan, misalnya, negara yang dipimpin oleh Paus pada abad pertengahan dan Kota Vatikan saat ini. H.M. Rasyidi menjelaskan pengertian lembaga kekuasaan rohani itu “adalah kerajaan Paus di mana para ahli agama mendominir rakyat lainnya. Dalam Islam hal itu tidak ada. Bahkan hidup sebagai pendeta yang tidak kawin juga bukan ajaran Islam”.²³ Islam tidak mengenal hierarki kependetaan seperti dalam agama Katholik. Tidak dimungkinkan sekelompok ahli agama dapat langsung berkuasa terhadap suatu negara karena klaim dirinya sebagai “wakil tuhan”. Sebaliknya, Islam mengajarkan persamaan hak antara penduduk, baik yang biasa maupun yang ahli dalam hal agama, atau bahkan antara yang beragama Islam ataupun yang bukan Islam.

Predikat negara dalam Islam yang paling tepat adalah nomokrasi Islam, yaitu kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah.²⁴ Seorang imam (khalifah) sebagaimana dijelaskan oleh al-Mawardi, dalam beberapa fungsinya ialah mengatur urusan negara dan menggulirkan

²² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teokrasi> akses 21 September 2017 pukul 19:22 WIB.

²³ H. M. Rasjidi, *Koreksi Terhadap Drs. Nurcholis Madjid tentang Sekularisme*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 84.

²⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi*, hlm. 87.

kebijakan sesuai dengan syariat agama.²⁵ Walaupun dalam hal ini al-Mawardi memberikan juga baju agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik,²⁶ akan tetapi hal ini dimaknai bahwa peran seorang pemimpin sebagai “...pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan agama...”²⁷ Keberlangsungan sistem pemerintahan didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (Syari’ah). Ia merupakan *rule of Islamic law*.²⁸

Menurut Azhary, Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah; b. Prinsip musyawarah; c. Prinsip keadilan; d. Prinsip persamaan; e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia; f. Prinsip peradilan bebas; g. Prinsip perdamaian; h. Prinsip kesejahteraan; i. Prinsip ket�aan rakyat.²⁹ Penyusun mengambil 2 (dua) prinsip yang terkait dengan topik pembahasan dalam penelitian ini:

a. Prinsip persamaan

Prinsip ini dapat difahami antara lain dari ayat al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذِكْرٍ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِيلَ لِتَعْرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عَنْدَ اللَّهِ أَنْتَمْ كُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ³⁰ (13)

²⁵ Abu Ḥāfiẓ ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 3.

²⁶ Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 63.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi*, hlm. 88.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 85-86.

³⁰ Al-Ḥujurāt (49): 13.

Berdasarkan prinsip ini, maka jaminan perlindungan hukum harus diberikan kepada setiap warga negara tanpa memandang kedudukannya, apakah ia kepala negara ataupun rakyat biasa, ataukah apakah ia memiliki garis keturunan dengan penguasa ataukah tidak. Dalam Islam, penyelenggara negara dilarang memperlakukan rakyat secara diskriminatif.

b. Prinsip peradilan bebas.

Terkait hal ini al-Qur'an telah memberi garis hukum:

...وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل...³¹

Kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari campur tangan siapapun termasuk kepentingan kepala negara sekalipun. Hukum harus ditegakkan atas seluruh komponen rakyat. Termasuk dalam hal kebebasan peradilan ini, serta didasarkan juga dengan prinsip persamaan, ialah adanya kompetensi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada penguasa yang terbukti melanggar hak rakyat atau meyalahgunakan wewenangnya.

2. Konsep Negara Hukum

Ide Negara Hukum cukup populer dalam kehidupan bernegara dan telah lama dicita-citakan oleh manusia. Ide ini lahir sebagai antitesis dari suatu pergumulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasanya (raja). Maka sebagai suatu produk sejarah, pengertian dan hakikat dari negara hukum yang ingin diwujudkan berbeda-beda di setiap zamannya.

³¹ Al-Nisa' (4): 58.

Gagasan Negara Hukum klasik pertama kali diperkenalkan oleh Plato dalam karyanya *Politea (The Republic)*, *Politicos (The Stateman)* dan *Nomoi (The Law)*. Dalam gagasan negara ideal Plato, penguasa yang memerintah seharusnya memiliki moralitas yang baik dan terpuji serta memiliki kebijakan dan segala macam ilmu pengetahuan, terutama ilmu pemerintahan.³² Kedudukan dan fungsi hukum dalam bernegara muncul dalam karyanya, *Nomoi (The Law)*. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.³³

Ide tersebut dikembangkan oleh Aristoteles dalam bentuk negara *Politea*. Dalam negara *Politea*, hukum harus menjadi sumber kekuasaan para penguasa agar pemerintahannya terarah pada pemenuhan kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum.³⁴ Jika negara dijalankan berdasarkan hukum, penguasa tidak akan dipengaruhi oleh keinginan atau nafsunya dan akan terhindar dari godaan kesewenang-wenangan yang dapat muncul.

Aristoteles menjadi filosof terakhir serta penutup diskursus mengenai ide negara hukum klasik. Diskursus seputar negara hukum baru berlanjut pada abad ke-17 dan 18 di Eropa Barat (Kontinental). Para ahli di Eropa Barat menggunakan istilah *Rechtsstaat* dalam menjelaskan ide negara hukumnya. Istilah *Rechtsstaat* sendiri berasal dari bahasa Jerman dan diperkenalkan oleh Robert von Mohl. Gagasan terpenting dari konsep ini terletak pada kehendak

³² Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 13.

³³ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, hlm. 20.

³⁴ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum*, hlm. 18.

untuk membatasi kekuasaan raja-raja yang memerintah secara absolut tanpa ada kekuatan yang dapat menjadi kontrol, sebagai akibat dari situasi sosial dan politik pada saat itu. Pelopor ide negara hukum (*rechtsstaat*) formal ialah Julius Stahl. Menurutnya, ada empat unsur negara hukum formal: a. Perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM); b. Pemisahan kekuasaan; c. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri³⁵

Para ahli di negara-negara Anglo Saxon juga merumuskan konsep negara hukumnya yaitu *Rule of Law*. Konsep ini muncul lebih dikarenakan adanya reaksi dari keberadaan negara polis (*polizei staat*), yang menitikberatkan dan bertumpu sepenuhnya pada faktor keamanan semata (*Sallus Publica Suprema lex* dan *Principe legibus solutus est*).³⁶ Tokoh yang terkenal dalam perkembangan konsep ini adalah A.V. Dicey. Menurutnya, unsur-unsur *rule of law* ialah sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenangwenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.³⁷

Negara Hukum Indonesia secara konsep tidak dapat dipersamakan dengan konsep *rechtsstaat* maupun *Rule of Law*. Tetapi akibat penjajahan Belanda

³⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

³⁶ Putera Astomo, “Eksistensi Peradilan Administrasi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 43 No. 3 (2014) hlm. 366.

³⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm.58.

yang menganut sistem hukum kontinental, maka pembentukan negara hukum dan sistem hukum di Indonesia turut terpengaruh oleh sistem hukum kontinental (*rechtsstaat*) sebagaimana diungkapkan oleh Soetandyo Wignjosoebroto:

Hukum Kolonial bagaimanapun juga adalah hukum yang mempertimbangkan substansinya secara formal masih berlaku, dan sebagian besar kaidah-kaidahnya masih merupakan hukum positif Indonesia berdasarkan berbagai ketentuan peralihan. Perkembangan hukum di Indonesia selama ini, sejak masa kekuasaan kolonial sampai pun ke masa-masa sesudahnya, adalah perkembangan yang bergerak ke arah dan/ atau menurut pola-pola hukum Eropa, dan dalam hal ini hukum Belanda. Memutus alur perkembangan ini, berarti memutus hubungan tradisional sebagaimana pernah terkembang dalam sejarah antara Indonesia dan Belanda yang sebenarnya juga ikut meliput berbagai aspek yang sifatnya institusional, seperti misalnya peradilan dan pendidikannya akan berarti memaksa Indonesia mengembangkan hukum nasionalnya dengan beranjak dari awal lagi, dan menyia-nyikan apa yang hingga kini telah tercapai.³⁸

Oleh karena pengaruh tersebut, Negara Indonesia dalam tujuannya mewujudkan suatu negara hukum juga membentuk pengadilan administrasi negara sebagaimana yang dianut negara Eropa kontinental. Lembaga tersebut dikenal dengan sebutan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dibentuk berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Jo Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³⁸ Hendrik Salomon, “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan suatu Pemerintahan yang Baik,” *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 4 (2010), hlm. 18.

Jenis penelitian ini ialah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Secara deskriptif, penelitian akan menggambarkan secara apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.³⁹ Adapun pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain.⁴⁰ *Legal institutions* yang dimaksud ialah *Wilayah Al-Mazālim* dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis merujuk kepada satu ketentuan yaitu terpenuhi tuntutan secara keilmuan khusus dengan ukuran yaitu apakah suatu permasalahan hukum konkret telah memenuhi kriteria yuridis atau tidak.⁴¹ Adapun pendekatan normatif dalam kegiatan analisisnya mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, yakni yang dilihat adalah apakah syarat normatif dari bangunan hukum itu sendiri sudah terpenuhi atau tidak.⁴² Dalam penelitian ini

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 234.

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 313.

⁴¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 89.

⁴² *Ibid.*, hlm. 87.

pendekatan normatif digunakan dalam mengkaji *Wilāyah Al-Mazālim*, sedangkan pendekatan yuridis untuk mengkaji PTUN di Indonesia.

4. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deduktif-komparatif. Metode deduktif adalah pola berpikir yang bertitik tolak dari pernyataan yang bersifat umum, dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴³ Kemudian dilakukan analisis data secara komparatif guna mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu.⁴⁴ Dalam penelitian ini sasaran yang dimaksud ialah mengetahui aspek kedudukan dan kompetensi dari kedua lembaga serta persamaan dan perbedaan antara keduanya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Bahan Primer

Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- 1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁴³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 40.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 172.

- 3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - 4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - 5) *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyyah* karya al-Mawardi.
- b. Sumber Bahan Sekunder
- Data pendukung dalam penelitian ini berupa buku-buku, kitab fikih, jurnal, skripsi dan tesis yang berhubungan dengan objek penelitian yakni *Wilāyah al-Mazālim* dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi terdiri atas pendahuluan, pembahasan dan penutup, dengan tujuan penelitian dapat disajikan secara runut dan sistematis. Adapun sistematika penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran umum dari permasalahan yang dikaji.

Bab II berisi tinjauan umum *Wilāyah al-Mazālim* dalam sistem pemerintahan Islam, meliputi pengertian, dasar hukum, sejarah pembentukan dan perkembangan, kedudukan dan kompetensi *Wilāyah al-Mazālim*. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan seputar *Wilāyah al-Mazālim* yang berkaitan dengan pembahasan selanjutnya.

Bab III berisi tinjauan umum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia, meliputi pengertian, dasar hukum, sejarah pembentukan dan perkembangan, kedudukan dan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan seputar PTUN di Indonesia yang berkaitan dengan pembahasan selanjutnya.

Bab IV berisi analisis perbandingan kedudukan dan kompetensi *Wilāyah al-Mazālim* dan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi perbandingan kedudukan, perbandingan kompetensi, serta analisis persamaan dan perbedaannya.

Bab V berisi penutup, meliputi kesimpulan untuk menjawab pokok masalah serta saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian, diantaranya ialah:

1. Berkaitan dengan kedudukan dan kompetensi dari *Wilayah al-Mazālim* dan PTUN di Indoneisa diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal kedudukan lembaga secara struktural, kedudukan *Wilayah al-Mazālim* bergantung kepada bagaimana kebijakan khalifah, apakah dipimpin langsung oleh khalifah, diwakilkan kepada orang lain (baik itu mengangkat *qadi*, atau dijabat oleh *Qādi Qudāt*) atau kombinasi dari keduanya. Adapun secara fungsional, *Wilayah al-Mazālim* lebih tinggi dari *Wilayah al-Qadā* dan *Wilayah al-Hisbah* dikarenakan memiliki wewenang menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan lainnya.
 - b. Kompetensi Absolut *Wilayah al-Mazālim* tersusun dari unsur objek sengketa dan subjek sengketa. Objek sengketa dari *Wilayah al-Mazālim* ialah kesewenang-wenangan (*al-Zulmu*) secara umum, yakni pelanggaran dan penyimpangan dari pejabat, atau orang-orang yang memiliki kekuatan atau pengaruh, baik berupa tindakan maupun kebijakan. Objek sengketanya mencakup perkara administrasi negara,

beberapa perkara pidana, perkara kemaslahatan umum, perkara hak uji materiil hingga perkara pemberhentian kepala negara. Sedangkan subjek sengketa dari perkara *al-Mazālim* terdiri dari yaitu rakyat dan pejabat pemerintahan, dimana keduanya dapat menjadi Penggugat atau Tergugat. Dalam beberapa perkara *Wilāyah al-Mazālim* tidak membutuhkan adanya aduan/laporan. Penyusun kesulitan menemukan informasi tentang kompetensi relatif lembaga ini.

- c. Kedudukan PTUN di Indonesia berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, baik secara organisasi, administrasi dan finansial. Hal ini dapat memberikan dampak kepada kewenangan dan pelaksanaan putusan dari PTUN itu sendiri. Dalam menjalankan fungsinya PTUN juga tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara yang merupakan bagian dari kompetensi absolut lembaga peradilan lainnya. Hal ini dikarenakan kedudukannya yang sejajar dengan tiga badan peradilan lainnya sedangkan setiap badan peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung telah memiliki kompetensi absolutnya masing-masing.
- d. Kompetensi Absolut PTUN di Indonesia tersusun dari unsur objek sengketa dan subjek sengketa. Objek sengketa dari PTUN terbatas kepada Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009 dan telah diperluas dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014. Objek sengketa dari PTUN juga mengalami perluasan dengan adanya permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014.

Beberapa perluasan objek sengketa masih membutuhkan penjelasan lebih rinci dalam pelaksanaannya. Adapun subjek sengketa di sistem PTUN terdiri dari penggugat yakni orang atau badan hukum perdata, serta tergugat yakni badan atau pejabat tata usaha negara. Kompetensi relatif PTUN di Indonesia ialah pengadilan dengan daerah hukum meliputi tempat kedudukan tergugat yang berwenang mengadili sengketa TUN.

2. Berkaitan dengan kegiatan analisis persamaan dan perbedaan kedudukan dan kompetensi dari *Wilāyah al-Mazālim* dan PTUN di Indoneisa diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari kedudukan kedua lembaga, maka secara struktural *Wilāyah al-Mazālim* berpeluang memiliki kedudukan yang lebih tinggi di antara *Wilāyah al-Qadā* dan *Wilāyah al-Hisbah* mengikuti kebijakan khalifah, di posisi manakah ia akan meletakkan tugas ini. Sedangkan PTUN baik secara organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Adapun secara fungsional, *Wilāyah al-Mazālim* memiliki wewenang yang lebih tinggi dari *Wilāyah al-Qadā* dan *Wilāyah al-Hisbah* bagaimanapun kedudukan strukturalnya. Hal ini berbeda dengan PTUN yang tidak memiliki kewenangan menyelesaikan perkara yang telah menjadi kompetensi absolut badan peradilan lainnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- b. Persamaan dan perbedaan kompetensi kedua lembaga peradilan terbagi dalam 2 pembahasan yakni objek dan subjek sengketa. Objek sengketa

Wilayah al-Mazālim sangat luas, mencakup seluruh bentuk kesewenang-wenangan (*al-Zulmu*). Dengan merujuk kepada kewenangannya yang luas tersebut, hampir tidak ditemukan adanya “ruang hampa” dan/atau *grey area* berkaitan dengan perkara administrasi negara. Sedangkan objek sengketa di PTUN walaupun telah mengalami perluasan, namun masih menyisakan “ruang hampa” yang tidak dapat disentuh seluruh badan peradilan dan/atau *grey area* yang menimbulkan potensi perkara ditolak oleh seluruh lembaga peradilan. Adapun subjek sengketa hampir sama dengan *Wilayah al-Mazālim*, dengan sedikit perbedaan dalam sistem PTUN yaitu badan atau pejabat TUN tidak dapat menjadi pihak Penggugat, serta rakyat tidak dapat menjadi pihak Tergugat. Penyusun kesulitan dalam membandingkan kompetensi relatif kedua lembaga dikarenakan sulitnya memperoleh penjelasan kompetensi relatif dari *Wilayah al-Mazālim*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan hasil yang telah dipaparkan, penyusun memberikan saran diantaranya:

1. Perluasan kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara pada prinsipnya tidak diperlukan manakala semua wilayah perbuatan pemerintah yang dimungkinkan terjadi sengketa di dalamnya memiliki akses yang jelas kepada peradilan (*access to justice*). Perlu adanya peraturan dalam sistem PTUN di Indonesia yang memperjelas bagaimana alur memperoleh

keadilan untuk beberapa aspek yang masih berada dalam “ruang hampa” atau masih kabur (*grey area*), misalkan Perbuatan Hukum Intern (*interne rechtshandelingen*), Perbuatan Hukum Privat (*privaatrechtelijke handelingen*), Perbuatan Hukum Publik Bersegi Banyak (*meerzijdige publiekrechtelijke handelingen*), sengketa kepegawaian PTN, dan sebagainya.

2. Beberapa aspek dari sistem *Wilāyah al-Mazālim* dapat menjadi masukan dalam upaya perbaikan penyelesaian sengketa administrasi di Indonesia, diantaranya dalam aspek perluasan kompetensi absolut, penguatan kedudukan badan peradilan, perluasan jenis vonis yang dapat dijatuhankan oleh hakim, mekanisme ganti rugi, penyederhanaan prosedur beracara, dan sebagainya.
3. Diperlukan upaya sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah dan pihak yang berwenang perihal perluasan kompetensi absolut PTUN pasca diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Perluasan yang dimaksud diantaranya mengenai perluasan makna KTUN dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, perluasan kompetensi PTUN berupa pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, serta perubahan paradigma KTUN dimana sebelumnya bersifat fiktif negatif menjadi fiktif positif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat 3 UU No. 30 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat*, Bandung: Syaamil Quran, t.t.

B. Kelompok Hadis

'Asqalāniy, Aḥmad Ibn 'Aliy Ibn Hajar al-, *Fath al-Bāriy bisyarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, Kairo: Dār al-Hadīs, 2004.

Ḥanbal, Abū 'abdullāh Aḥmad bin Muḥammad bin, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, ttp.: Muassasah al-Risālah, 2001.

Ibn Mājah, *Sunān Ibn Mājah*, Aleppo: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Muslim bin al-Hajjāj, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ binaqli al-'Adl 'an al-Adl ila Rasūlillāh*, Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabi, tt.

Nasā'i, Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurāsāni al-, *al-Sunān al-Ṣugrā li al-Nasā'i*, Aleppo: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1986.

C. Kelompok Fiqih

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2010.

Djalil, A. Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Mawardi, Abu al-Ḥasan 'Ali ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣri al-Bagdādi al-, *Al-Aḥkam al-Sultāniyyah wa al-Wilāyah al-dīniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.

Syabaro, Isham Muhammad, *Qāḍi Qudāt dalam Sejarah Islam*, alih bahasa Utsman Zahid, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2012.

Qāsimī, Zāfir al-, *Nizām al-Hukmi fī al-Syarī'ati wa al-Tārīkhi al-Islāmi*, Beirut: Dār al-Nafātisy, 1987.

Zuhailī, Muḥammad al-, *Mausū'ah Qadāyā Islāmiyyah Mu'āṣirah*, Damaskus: Dār al-Maktabi, 2009.

Zuhailī, Wahbah al-, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zallūm, 'Abd al-Qādīm, *Nizām al-Hukmi fī al-Islām*, ttp.: Ḥizb al-Tahrīr, 2002.

D. Kelompok Hukum

Abdoellah, Priyatmanto, *Revitalisasi Kewenangan PTUN: Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Administrasi Negara*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Abidin, Zaenal, "Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa atau Objek Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia," *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1991).

Angkasa, Nawa, "Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Nizham*, No. 1 (2013).

Astomo, Putera, "Eksistensi Peradilan Administrasi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol. 43 No. 3 (2014).

Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis dan Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1993.

Helmi, Tgk. H., "Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dalam Islam (Study Komparatif antara Lembaga al-Mazhalim dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia)," *Jurnal Al-Mizan*, Vol. I(I) (2013).

Jailani, Sofyan, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945" *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 6 No. 3 (2012).

Koto, Alaiddin, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Lubis, Siti Zubaedah Agustina, “Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Hukum Tata Negara,” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2006).

Marzuki, Laica, “Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Konteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI.”, *makalah* ditulis pada tanggal 26 Januari 2017.

Mukhlis, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Permana, Tri Cahya Indra, “Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau dari segi Access to Justice” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 3, (2015).

Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Rajawali, 2011.

Salomon, Hendrik, “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan suatu Pemerintahan yang Baik,” *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 4 (2010).

Savitri, Diah, “Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengangkatan Hakim Agung”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1 No. 2 (2013).

Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Sultan, Lomba, “Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia,” *Jurnal Al-Umm*, Vol. 13 (2013).

Susilo, Agus Budi, “Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2 (2013).

Tjandra, W. Riawan, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.

Utama, Kartika Widya, "Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat Fiktif Positif" *Jurnal Notarius* Edisi 08 No. 2 (2015).

Utama, Yos Johan, "Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Akses Warga Negara untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrasi Negara,: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10(1), (2007).

Widodo, Titiek Triwulan dan Ismu Gunadi, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

E. Lain-Lain

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Hakam, Abdullah bin Abdul, *Biografi Umar bin Abdul Aziz Penegak Keadilan*, alih bahasa Habiburrahman Syaerozi, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengadilan> akses 6 November 2017 pukul 10.52 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peradilan> akses 27 Oktober 2017 pukul 21.14 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teokrasi> akses 21 September 2017 pukul 19:22 WIB.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Pokja Laporan Tahunan MARI, *Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2017.

Rasjidi, H. M., *Koreksi Terhadap Drs. Nurcholis Madjid tentang Sekularisme*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

F. Undang-undang

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH TEKS ARAB

No	Bab	Hlm	Footnote	Terjemah
1.	I	12	30	Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.
2.	I	13	31	dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil
3.	II	22	5	Wahai anakku, janganlah engaku menyekutukan Allah, sesungguhnya memperseketukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar.
4.	II	22	6	Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat kebohongan terhadap Allah
5.	II	22	7	Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.
6.	II	22	8	Dan barangsiapa yang dibunuh secara zhalim
7.	II	22	9	Lalu diantara mereka ada yang menzhalimi diri sendiri
8.	II	22	10	Barangsiapa yang melakukan demikian, maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri
9.	II	25	21	Dia (Zulkarnain) berkata, “Barangsiapa berbuat zhalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras.
10.	II	25	22	Lalu, orang-orang yang zhalim mengganti perintah dengan (perintah lain) yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka Kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka (selalu) berbuat fasik.

11.	II	26	23	Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzhalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu.
12.	II	26	24	Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan).
13.	II	26	25	Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk.
14.	II	26	26	Wahai anakku, janganlah engaku menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekuatkan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar.
15.	II	27	30	Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin ‘Abdur Rahman bin Bahram ad-Darimi, telah menceritakan kepada kami Marwan yaitu Ibnu Muhammad ad-Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Sa’id bin ‘Abdul ‘Aziz dari Rabi’ah bin Yazid dari Abu Idris al-Khalwani dai Abu Dzar dari Nabi Saw. dalam meriwayatkan fir,am A;;ah Swt. yang berbunyi: Hai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan diri-Ku untuk berbuat zhalim dan perbuatan zhalim itu pun Aku haramkan diantara kamu.
16.	II	28	31	Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah bin Qan’ab, telah menceritakan kepada kami Dawud yaitu Ibnu Qais dari ‘Ubaidillah bin Miqsam dari Jabir bin ‘Abdullah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Hindarilah kezhaliman, karena kezhaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat
17.	II	28	32	Telah mengabarkan kepada kami Wahb bin Bayan telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku ‘Amru bin al-Harits dari Bukair bin ‘Abdullah dari ‘Ubaidah bin Musafi’ dari Abu Sa’id al-Khudri, dia berkata: Ketika Rasulullah Saw. membagi sesuatu, datanglah seseorang mendesak-desak beliau, lalu Rasulullah Saw. menusuknya dengan dahan pohon kurma yang beliau bawa, lalu orang itu keluar dan Rasulullah Saw. bersabda: “Kemari dan balaslah.” Dia berkata “Aku sudah maafkan wahai Rasulullah.”
18.	II	28	33	Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari ‘Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Abu az-Zubair dari Jabir dia berkata: Tatkala

				rombongan Muhibbin yang menyebrangi lautan kembali ... Rasulullah Saw. bersabda: Wanita tua itu benar, wanita tua itu benar, bagaimana mungkin Allah akan memberkati suatu kaum dimana yang lemah tidak dibela oleh yang kuat!
19.	II	29	34	Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdur Rahim telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami 'Ubaidilla bin Abi Bakr bin Anas, dari Anas r.a. mengatakan, Rasulullah Saw. bersabda: Tolonglah saudaramu baik ia zhalim atau dzhalimi. Ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, saya maklum jika ia dzhalimi, namun bagaimana saya menolong padahal ia zhalim?" Nabi menjawab, "engkau mencegahnya atau menahannya dari kezhaliman, itulah cara menolongnya."
20.	II	29	35	Telah menceritakan kepada kami Muhammad, dia adalah anak dari Salam telah mengabarkan kepada kami Makhlad bin Yazid al-Harrani berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraid berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Syihab dari 'Urwah bin az-Zubair bahwasannya dia menceritakan ada seorang dari kalangan Anshar bersengketa dengan Zubair di hadapan Nabi Saw. tentang aliran air di daerah Al-Harra yang mereka gunakan untuk menyirami pepohonan kurma. Maka Rasulullah Saw. berkata kepada Zubair, "Wahai Zubair," beliau memerintahkannya berbuat ma'ruf "kirimlah kepada tetanggamu." Orang Anshar itu berkata, "Tentu saja kamu bela dia karena dia putra bibimu." Maka wajah Rasulullah Saw. memerah kemudian berkata, "Berilah air kemudian bendunglah hingga air itu kembali ke dasar ladang dan tunaikanah haknya."
21.	II	30	36	Telah menceritakan kepada kami Suraij dan Yunus bin Muhammad, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salama dari Qatada dan Tsabit al-Bunani dari Anas bin Malik berkata: pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. harga barang menjadi mahal, sehingga orang-orang berkata: wahai Rasulullah! tetapkanlah harga, maka Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah Sang Maha pencipta, yang Maha menggenggam dan yang melapangkan serta hanyalah Dia yang Maha penentu harga, dan saya berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang

				menuntutku atas kezaliman yang saya perbuat kepadanya baik hak darah maupun harta."
22.	II	41	70	Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidillah berkata: telah menceritakan kepadaku Nafi’ dari ‘Abdullah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, maka dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka...”



BIOGRAFI TOKOH

Al-Mawardi

Dilahirkan di Basrah, Irak, tahun 364 H. Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabib al-Baṣri al-Bagdadi al-Mawardi. Ia populer dengan nama al-Mawardi. Beliau berguru kepada ulama Basrah, Abu al-Qasim al-Shumairi (wafat 386 H) dan menjadi murid istimewa ulama besar Baghdad, Abu al-Hamid al-Isfirayini (wafat 406 H). Beliau menimba ilmu bahasa dan sastra kepada Imam Abu Muhammad al-Bafi (wafat 398 H), yang merupakan orang paling alim pada zamannya dalam bidang *nahwu*, sastra, dan *balaghah*.

Kefaqihan al-Mawardi telah mengantarkannya pada jabatan Qadhi al-Qudhat (Kepala Hakim) pada tahun 429 H di era Khalifah al-Qaim bi Amrillah (422-467 H). Al-Mawardi adalah seorang *fuqaha* mazhab Syafi’i yang sudah sampai pada level Mujtahid, dan merupakan pemimpin mazhab Syafi’i di zamannya. Beliau wafat tahun 450 H pada usia 86 tahun. Karyanya meliputi berbagai bidang keilmuan, terutama fikih yaitu: *al-Iqna'*, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, *al-Hawi*, *Qawanin al-Wuzara'*, *Tashil al-Nadhr*, dan *Ta'jil ad-Dzafr*.

‘Abd al-Qadim Zallum

Memiliki nama lengkap Al ’Alim Al Kabír Syeikh Abdul Qadim bin Yusuf bin Abdul Qadim bin Yunus bin Ibrahim Zallum. Lahir pada tahun 1924 (1342 H) di Kota Al Khalil, Palestina. Ayahnya adalah seorang hafidz Alquran dan guru pada masa Khilafah Utsmaniyah. Keluarga Zallum termasuk keluarga yang memelihara dan mengurus Masjid al-Ibrahimi al-Khalil, peninggalan Nabi Yaqub as.

Ketika usianya genap lima belas tahun, ayahnya mengirim Beliau ke Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1939 M. Beliau memperoleh ijazah al-Ahliyah al-a’la pada tahun 1942 M. Berikutnya, Beliau memperoleh ijazah Pendidikan tinggi (Syahadah al-‘Aliyah) Universitas al-Azhar pada tahun 1947. Beliau kemudian memperoleh Ijazah al-‘Alamiyah dalam bidang keahlian al-Qada (peradilan), setara ijazah doktor saat ini, pada tahun 1949 M.

Beliau dijuluki al-Malik oleh rekan-rekan sejawatnya di Universitas al-Azhar karena kemampuannya yang sangat menonjol dalam menyerap dan menyampaikan kembali materi perkuliahan. Beliau kembali ke al-Khalil tahun 1949 kemudian menjadi guru di Madrasah Bait al-Lahim dan Madrasah Usamah bin Munqidz. Beliau pernah dimasukkan ke penjara beberapa tahun sebagai tahanan politik di penjara al-Jafar al-Shahrawi karena sikap penentangannya yang kuat terhadap sistem kufur yang diterapkan di Yordania dan dunia Islam lainnya.

Beliau merupakan pemimpin kedua dari partai politik global Hizbut Tahrir setelah pendirinya yakni Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani. Beliau wafat di Beirut pada Selasa 29 April 2003. Beliau menulis beberapa buku, diantaranya: *Mafahim Khatirah li Darbi al-Islam wa Tarkiz al-Hadlarah al-Gharbiyah*, serta perluasan

dan revisi atas kitab *Nizham al-Hukm fi al-Islam* karya Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani.

Muhammad al-Zuhaili

Prof. Muhammad al-Zuhaili lahir di Dair Atiya, Damaskus pada tanggal 10 Agustus 1941. Beliau telah menikah dan dikaruniai empat orang anak. Memperoleh gelar Sarjana Syariah pada tahun 1965 di Fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus. Selanjutnya memperoleh gelar Magister Perbandingan Fiqih, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas al-Azhar pada tahun 1967. Kemudian memperoleh gelar Doktor dalam bidang Perbandingan Fiqih, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas al-Azhar pada tahun 1971.

Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus tahun 1997-1985. Selanjutnya menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyyah, Universitas Syarjah tahun 2000-2006. Beliau mengampu beberapa mata kuliah seputar Syari'ah, diantaranya Peradilan, Tata Negara, dan Perbandingan Fiqh di beberapa universitas Islam terkemuka. Beliau juga menulis beberapa buku seputar Syari'ah dan Hukum.

Zafir al-Qasimi

Memiliki nama lengkap Zafir ibn al-Syaikh Jamal al-Din ibn Muhammad Said al-Qasimi. Lahir di Damaskus pada tahun 1913 dari keluarga yang memiliki nasab dengan Imam Hasan bin Ali ra. Mengenyam pendidikan Islam dan bahasa Arab di Tsanawiyah Sulthaniyah, kemudian mempelajari bahasa perancis. Setelahnya ia bekerja sebagai pengacara dengan Sabri al-Asali.

Walaupun tidak banyak menghasilkan karya tulis, karya-karyanya menunjukkan kedalaman pengetahuannya dan telah menggunakan aturan yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Karyanya mencakup buku-buku seputar bahasa, sejarah dan hukum. Selain itu ia juga telah mempublikasikan hasil penelitiannya dalam beberapa jurnal berbahasa arab terkemuka. Beliau wafat di Paris pada tahun 1984.

Wahbah al-Zuhaili

Lahir di Dair Atiya, Damaskus, pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Fakultas Syari'ah, Universitas al-Azhar Kairo. Beliau memperoleh gelar Magister pada bidang Syari'ah dari Universitas al-Azhar tahun 1959, serta memperoleh gelar Doktor pada tahun 1963 di tempat yang sama.

Setelah memperoleh ijazah Doktor, beliau bekerja sebagai staf pengajar pada Fakultas Syariah, Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab.

Beliau juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di berbagai negara termasuk di Indonesia. Beliau sangat produktif menulis, mulai dari artikel hingga kitab besar yang terdiri dari beberapa jilid. Di antara karya monumental beliau yaitu *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dan *Tafsir al-Munir*.

Priyatmanto Abdoellah

Priyatmanto Abdoellah lahir di Surabaya, 7 Februari 1960. Jabatan terakhir beliau adalah sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Lulus studi Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1984), Magister Hukum (S2) di Universitas Bhayangkara Surabaya (2009) dan Program Doktor Hukum di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar di tahun 2013.

Karir sebagai hakim diawali di Pengadilan TUN Kendari (1998-2002), kemudian Pengadilan TUN Denpasar (2002-2006) dan Hakim Pengadilan TUN Surabaya (2006-2007). Selanjutnya kariernya berlanjut sebagai Wakil Ketua Pengadilan TUN Denpasar (2007-2008), Ketua Pengadilan TUN Kendari (2008-2010), Ketua Pengadilan TUN Makassar (2010-2013) dan Ketua Pengadilan TUN Surabaya (2013-2014). Di tengah menjabat sebagai Ketua PTUN Surabaya, pada tanggal 21 Desember 2014 beliau wafat di RS Graha Amerta Surabaya.

Salah satu karya Beliau ialah buku berjudul *Revitalisasi Kewenangan PTUN: Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku tersebut merupakan salah satu bagian dari disertasi Beliau yang berjudul “Revitalisasi Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara” yang berhasil dipertahankan pada ujian terbuka Program Doktor di Universitas Hasanuddin tahun 2014.

W. Riawan Tjandra

W. Riawan Tjandra adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum dan Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Lahir di Madiun pada tanggal 16 Mei 1969. Pada tahun 1993 lulus dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, tahun 2003 lulus dari Magister Hukum Program Pasca Sarjana UGM, dan tahun 2009 lulus dari Program Doktor Ilmu Hukum FH-UGM. Keseluruhan studinya diselesaikan dengan predikat cumlaude.

Mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sejak tahun 1993. Selain itu juga menjadi advokat, konsultan hukum, dan Sekretaris pada Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH) UAJY. Beliau aktif menulis buku-buku, antara lain: *Hukum Acara PTUN*, *Hukum Administrasi Negara*, *Hukum Keuangan Negara*, *Litis Domini Principle*, dan *Dinamika Peran Pemerintah dalam Perspektif Hukum*. Beliau juga aktif menulis di berbagai media massa.

KITAB AL-AHKĀM-SULTĀNIYYAH WA AL-WILĀYAH

AL-DĪNIYYAH

BAB WILĀYAH AL-MAZĀLIM

البَابُ السِّتَّانِعُ

فِي وِلَايَةِ الظَّالِمِ

ونظر المظالم هو قود المنظالين إلى التناصف بالرهبة وجزر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة ؛ فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر ، نافذ الأمر ، عظيم الهيئة ، ظاهر العفة ، قليل الطمع ، كثير الورع ، لأنَّه يحتاج في نظره إلى سطوة الحلة وثبت القضاة ، فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين ، وأن يكون بخلافة القدر نافذ الأمر في الجهتين ، فإن كان من يملك الأمور العامة كالوزراء والأمراء لم يتحقق النظر فيها إلى تقليد وكان له بعموم ولايته النظر فيها ، وإن كان من لم يفوض إليه عموم النظر احتاج إلى تقليد وتولية إذا اجتمعت فيه الشروط المقدمة ، وهذا إنما يصح فيما يحوز أن يختار لولاه العهد أو لوزارة الفضويض أو لإمارة الأقاليم إذا كان نظاره في المظالم عاماً ، فإن اقتصر به على تنفيذ ماعجز القضاة عن تنفيذه وإعطاء ماقصرت بهم عن إمضائه جاز أن يكون دون هذه الرتبة في القدر والخطر بعد أن لا تأخذه في الحق لومة لائم ولا يستخفه الطمع إلى رشوة . فقد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم المظالم في الشرب الذي تنازعه إيزير بن العوام رضي الله عنه ورجل من الأنصار فحضره بنفسه فقال للزبير :

إِسْقِ أَنْتَ يَازِبِيرَ مِمْ إِنْصَارِيْ فَقَالَ الْأَنْصَارِيْ إِنَّهُ لَأَبْنُ عَنْكِنَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ
فَغَفَّيْبَ مِنْ قَوْلِهِ وَقَالَ يَازِبِيرَ أَجْرِهُ عَلَى بَطْنِهِ حَتَّى يَكُلُّنَ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .
وَإِنَّمَا قَالَ أَجْرِهُ عَلَى بَطْنِهِ أَدْبَالَهُ بِلَرَأْهُ عَلَيْهِ . وَانْخَلَفَ لِمَ أَمْرَهُ بِإِجْرَاءِ الْمَاءِ إِلَى
الْكَعْبَيْنَ هُلْ كَانَ حَقًا بِهِ لَهُ حَكَمًا أَوْ كَانَ مِبَاحًا فَأَمْرَهُ بِهِ زِجْرًا عَلَى جَوَابِنِ ، وَلَمْ
يَنْتَدِبْ لِلْمَظَالِمِ مِنَ الْخَلْفَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَحَدٌ لِأَنَّهُمْ فِي الصُّدُرِ الْأَوَّلِ مَعَ ظَهُورِ الدِّينِ عَلَيْهِمْ
بَيْنَ مَنْ يَفْوَدُهُ التَّنَاصُفُ إِلَى الْحَقِّ أَوْ بِزِجْرِهِ الْوَعْذَرُ عَنِ الظَّلْمِ ، وَإِنَّمَا كَانَتِ الْمَنَازِعَاتُ
تَحْرِي بَيْنَهُمْ فِي أَمْوَالِ مُشْتَهَيْهَا حَكْمُ الْقَضَاءِ ، فَإِنْ تَجُورَ مِنْ جَهَةِ أُعْرَابِهِمْ مُتَجُورٍ
ثَاهِ الْوَعْذَرُ أَنْ يَدْبِرَ وَقَادِهِ الْعَنْفَ أَنْ يَمْسِنْ فَاقْتَصَرَ خَلْفَاءِ الْسَّلْفِ عَلَى فَصْلِ التَّشَاجِرِ بَيْنَهُمْ

بالحكم والقضاء تعينا للحق في جهده لاقبادهم إلى التزامه ، واحتاج على رضى الله عنه حين تأخرت إمامته واحتلّت الناس فيها وتجرروا إلى فصل صرامة في الصيامه وزيادة بيقظ في الوصول إلى غواص الأحكام فكان أول من سلك هذه الطريقة واستقل بها ولم يخرج فيها إلى نظر المظالم الخمس لاستغفاره عنه . وقال في المنبرية : صار ثمنها سعا . وقضى في القارصه والقامصه والواقصه بالدينه أثلاطا . وقضى في ولد تنازعه امرأهان بما أدى إلى فصل القضاء ، ثم انتشر الأمر بعده حتى تجاهر الناس بالظلم والتغالب ولم يكفهم زواجر العذله عن التهانع والتجاذب ، فاحتاجوا في رد المظالم وإنصاف المظلومين إلى نظر المظالم الذي يعزز به قوه السلطة بنصف القضاء ، فكان أول من أفرد للظلماط يوما يتتصفح فيه قصص المظلومين من غير مباشره للنظر عبد الملك بن مروان ، فكان إذا وقف منها على مشكل أو احتاج فيها إلى حكم متقد رده إلى قاضيه أبي إدريس الأودي فنفذ فيه أحکامه لرهبة التجارب من عبد الملك بن مروان في علمه بالحال ووقوفه على السبب ، فكان أبو إدريس هو المباشر وعبد الملك هو الأمر : ثم زاد من جور الولاة وظلم العترة مالم يكفهم عنه إلا أقوى الأيدي وأنفذ الأوامر ، فكان عمر بن عبد العزيز رحمة الله أول من تدب نفسه للنظر في المظالم فردها وراعي السنن العادلة وأعادها ، ورد مظالم بنى أمية على أهلها حتى قيل له وقد شدد عليهم فيها وأخليط إنما تخاف عليك من ردك العاقد ، فقال كل يوم أتفقه وأخافه دون يوم القيمة لا وقتيه ، ثم جلس لها من خلفاء بنى العباس جماعة ، فكان أول من جلس لها المهدي ، ثم الهادي ، ثم الرشيد ، ثم المؤمن فأخر من جلس لها المهدي حتى عادت الأملاك إلى مستحقها . وقد كان ملوك الفرس يرون ذلك من قواعد الملك وقوانين العدل الذي لا يهم الصلاح إلا براعاته ولا يتم التناصف إلا ب مباشرته . وكانت قريش في الجاهلية حين كثُر فيهم الزعامه وانتشرت فيهم الرياسه وشاهدوا من التغالب والتجاذب مالم يكفهم عنه سلطان عقدوا قاهر حلقا على رد المظالم وإنصاف المظلوم من الظالم وكان سببه ماحكاها الزبير بن بكار أن رجلا من اليمن من بنى زيد قدم مكة متعمرا بيضاء فاشترأها منه رجل من بنى سهم ، وقيل إنه العاص بن وائل فلوى الرجل عقه فسألها ماله أو متاعه فامتنع عليه فقام على الحجر وأنشد بأعلى صوته . من البسيط :

يَالَّتَّهُمْ لَظُلْمٌ بِضَاعَهُ
يَبْطِرُ مَكَّةَ نَافِ الدَّارِ وَالنَّفَرِ
وَأَشْعَثُ تَحْرِمَ لَمْ تُفْضِ حُرْمَهُ
بَيْنَ الْمَقَامِ وَبَيْنَ الْجَبَرِ وَالْكَجَرِ

أَفَأُمْ مِنْ بَنِي سَهْمٍ يَذْمِنُهُمْ أَوْ ذَاهِبٌ فِي ضَلَالٍ مَالِ مُغَنِّمٍ
ثُمَّ قَيْسَ بْنُ شِبَّةَ السَّلْمِيَّ بَاعَ مَتَاعًا عَلَى أَبِي بْنِ خَلْفٍ فَنَوَاهُ وَدَهَبَ بِحُصَّهِ ، فَاسْتَجَارَ
بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي جَعْفَرٍ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَقَالَ قَيْسَ مِنَ الرِّجْزِ :

يَا أَيُّهَا الْكَرَمُ كَيْفَ هَذَا فِي الْحَرَامِ وَحُرْمَتُ الْبَيْتِ وَأَخْلَافُ الْكَرَمِ
أَظْلَمُ لَا يُمْنَعُ عَنِّي مِنْ ظَلَمٍ

فَأَجَابَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ مَرَادِسَ السَّلْمِيَّ مِنَ الْبِسِطِ :

إِنْ كَانَ جَارُكَ لَمْ تَنْفَعْكَ ذِمَّتُهُ وَقَدْ شَرَبْتَ بِكَامِ الْذَّلِّ أَنْفَاصًا
فَاتَّ الْبَيْتَ وَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا صَدِيدًا لَا تَلْقَ تَأْدِيبَهُمْ فَحُشْنًا وَلَا بَاسًا
وَمَنْ يَكُنْ يَفْنَاهُ الْبَيْتَ مُغَنِّمًا يَلْقَابَنَ حَرَبَ وَيَلْقَ المَرْءَ عَبَاسًا
قُوَّى قُرَيْشٍ يَأْخُلُّونَ مُكَلَّمَةً بِالْمَجْدِ وَالْخَزْمِ مَاعَاشَا وَمَا سَاسَا
سَاقِ الْكَعْجِيجِ وَهَذَا نَاثِرُ فَلَعْجَ وَالْمَجْدُ يُورَثُ أَخَاسًا وَأَسَدَاسًا
فَقَامَ أَبُو سَفِيَّانُ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ فَرِداً عَلَيْهِ مَالَهُ وَاجْتَمَعَتْ بَطْوَنُ قُرَيْشٍ
فَتَحَالَفُوا فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَدْعَانَ عَلَى رَدِ الْمَظَالِمِ عَكْكَةً وَأَنْ لَا يُظْلَمُ أَحَدٌ إِلَّا مَنْعَهُ وَأَخْذُوا
لِلْمَظْلُومِ حَقَّهُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ يَوْمَئِذٍ مَعْهُمْ قَبْلَ النَّبُوَّةِ وَهُوَ أَبُو حَمْزَةُ
وَعِشْرِينَ سَنَةً فَعَقْدُوا حَلْفَ الْفَضُولِ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَدْعَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكِرًا لِلْحَالِ :

«الَّقَدْ شَهَدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَدْعَانَ حَلْفَ الْفَضُولِ مَا لَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ
لِأَجْبَتُ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَهْبِطْ مُحَمَّرُ التَّعْمَرِ» .

وَأَقَى بِقَصْتَهُ وَمَا يَرِيدُهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شَدَّدَهُ فَقَالَ بَعْضُ قُرَيْشٍ فِي هَذَا الْحَلْفِ مِنَ الْبِسِطِ :

تَمِيمُ بْنُ مُؤْمَةَ إِنْ سَأَلْتَ وَهَاشِمًا وَزُهْرَةَ الْحَمِيرِ فِي دَارِ أَبِي جَدْعَانَ
مُنْتَهَى الْفِيَنِ عَلَى النَّدَى مَا غَرَدَتْ وَرَفِقَاهُ فِي فَنَنِي مِنْ جَدْعَرِ كَنَانَ^(١)
وَهَذَا وَإِنْ كَانَ فَعْلًا جَاهِلِيَا دَعْتُمْ إِلَيْهِ السِّيَاسَةَ فَقَدْ صَارَ بِخَضْرَوْرِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَمَا قَالَهُ فِي تَأْكِيدِ أَمْرِهِ حَكْمًا شَرِيعًا وَفَعْلًا نَبِيًّا .

(فصل) فَإِذَا نَظَرَ فِي الْمَظَالِمِ مِنْ اتَّدَبَ لَهُ جَعْلَ لِنَظَرِهِ يَوْمًا مَعْرُوفًا يَقْصِدُهُ فِيهِ

(١) هَذِهِ الْكَلَّةُ غَيْرُ وَاسِعَةٍ وَلَمْ تَقْفِ مَلِي مَسْتَهَا . فَلَنْتَظَرُ .

الظالمون ويراجعه فيه المتنازعون ، ليكون ماسواه من الأيام لما هو موكل إليه من السياسة والتدبير إلا أن يكون من عمال المظالم المنفردين لما فيكون متذوبا للنظر في جميع الأيام : ولتكن سهل الحجاب نزه الأصحاب .

ويستكمل مجلس نظاره بحضور خمسة أصناف لا يستغني عنهم ولا ينفصل عن نظره إلا بهم : أحدهم الحماة والأغوان بحسب القوى وتقسيم الجرائم . والنصف الثاني القضاة والحكام لا يستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق ومعرفة ما يجري في مجالسهم بين الخصوم : والنصف الثالث الفقهاء ليرجع إليهم فيما أشكل ويسألهم عما اشتبه وأعضل : والنصف الرابع الكتاب ليثبتوا ما جرى بين الخصوم وما توجه لهم أو عليهم من الحقوق . والنصف الخامس الشهود ليشهدوا على ما أوجبه من حق وأمضاه من حكم ، فإذا استكمل مجلس المظالم من ذكرنا من الأصناف الخمسة شرع حينئذ في نظرها .

والذى يختص بنظر المظالم يشتمل على عشرة أقسام : فالقسم الأول النظر في تعذر الولاية على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة ، فهذا من لوازم النظر في المظالم الذى لا يقف على ظلامة متظلم ، فيكون لسيرة الولاية متصفاً وعن أحواهم مستكشفاً ليقوهم إن أنصفوا ويفهموا إن عسروا ، ويبدل بهم إن لم ينصلفو .

(حكى) أن هربر عبد العزيز خطب على الناس في أول خلافته وكانت من أول خطبه فقال لهم : أوصيكم بتوسيع الله ، فإنه لا يقبل غيرها ولا يربح إلا أهلها ، وقد كان قوم من الولاية منعوا الحق حتى اشتري منهم شراء وبذلوا الباطل حتى افتدي منهم فداء ، والله لو لا سنة من الحق أحيطت فأحييتها وسنة من الباطل أحيطت فأماتها ما باليت أن أعيش وقتاً واحداً . أصلحوا آخرتكم تصليح لكم دنياكم إن امرأ ليس بيته وبين آدم إلا الموت لعرق له في الموت .

والقسم الثاني جور العمال فيما يجبونه من الأموال فيرجع فيه إلى القوانين العادلة في دواعين الأئمة فيحمل الناس عليها ويأخذ العمال بها وينظر فيما استزادوه ، فإن رفعوه إلى بيت المال أمر بده ، وإن أخلوه لأنفسهم استرجعه لأربابه .

(فقد حكى) عن المهدى رضى الله عنه أنه جلس يوماً للمظالم فرفعت إليه قصص من الكسور فسأل عنها ، فقال سليمان بن وهب : كان هربر الخطاب رضى الله عنه قد سقط الخراج على أهل السواد وما فتح من نواحي المشرق والمغرب ورقاً وجينا وكانت الدراريم

والدنا نير مضر وبة على وزن كسرى وقيصر ، وكان أهل البلدان يؤدون ما في أيديهم من المال عددا ولا ينظرون في فضل بعض الأوزان على بعض ، ثم فسد الناس فصار أرباب الخراج يؤدون الطبرية التي هي أربعة دوافع وتمسكون بالواقي الذي وزنه وزن المثقال ، فلما ولَّ زياد العراق طالب بأداء الواقف وألزمهم الكسور وجار فيه عمل بن أبيه ، إلى ابن ولِي عبد الملك بن مروان ، فنظر بين الوزنين وقدر وزن الدرهم على نصف وخمس المثقال وترك المثقال على حاله ، ثم إن الحجاج من بعده أعاد المطالبة بالكسور حتى أسقطها عمر بن عبد العزيز وأعادها من بعده إلى أيام المنصور إلى أن خرب السواد فأزال المنصور الخراج عن الخنطة والشمير ورقا وصبره مقاصمة وهو أكثر غلات السواد وأبقى البسيط من الحبوب والنخل والشجر على رسم الخراج وهو كما يلزمون الآن الكسور والمؤن ، فقال المهتدى معاذ الله أن ألزم الناس ظلما تقدم العمل به أو تأخر ، أسقطوه عن الناس ، فقال الحسن بن مخلد إن أسقطت أمير المؤمنين هذا ذهب من أموال السلطان في السنة الثنا عشر ألف ألف درهم ، فقال المهتدى على أن أقر حقا وأزيل ظلما وإن أجحف بيت المال .

والقسم الثالث : كتاب الدواوين لأنهم أمناء المسلمين على ثبوت أموالهم فيما يستوفونه له ويوفونه منه أعاده ، فيتصفح أحوال ما وكل إليهم ، فإن عدلوا بحق من دخل أو خرج إلى زيادة أو نقصان إلى قوانينه وقابل على تجاوزه .

(حُكْم) أن المنصور رضي الله عنه بلغه عن جماعة من كتاب دواوينه أنهم زوروا فيه وغيروا فأمر بإحضارهم وتقدم أدبيهم ، فقال حدث منهم وهو يضرب من الوافر :

أَطَالَ اللَّهُ عُمُرَكَ فِي صَلَاحٍ وَعِزٍّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
بِعَنْوَنَةِ تَسْتَحِيرٍ فَإِنْ مُخْرِنَا فَإِنَّكَ عِصْمَةً لِلْعَالَمِينَ
وَنَحْنُ الْكَاتِبُونَ وَقَدْ أَسَانُ فَهِبْنَا لِلْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ

فأمر بتحليتهم ووصل الفقي وأحسن إليه ، لأنه ظهرت منه الأمانة وبيان في التجابة ، وهذه الأقسام ثلاثة لا يحتاج إلى المظالم في تصفيتها إلى مظلم .

والقسم الرابع : تظلم المترفة من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم وإجحاف النظر بهم فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل فيجري بهم عليه وينظر فيها نقصوه أو منعوه من قبل ، فإن أخذته ولاة أمرهم استرجعه منهم ، وإن لم يأخذوه قضاه من بيت المال .
(٦ - الأحكام السلطانية)

كتب بعض ولاة الأجناد إلى المؤمن أن الجند شعبوا ونبيوا ، فكتب إليه: لو عدلت
لم يشعروا ، ولو وفيت لم ينبيوا ، وعزله عنهم وأدر عليهم أرزاقهم .
والقسم الخامس : رد الغصوب ، وهي ضربان أحددهما غصوب سلطانية قد تقلب
عليها ولاة الحور كالأملاك المقبوضة عن أربابها ، إما لرغبة فيها ، وإما لعدم اهتمامها ،
فهذا إن علم به والي المظالم عند تصفح الأمور أمر برد هذه قبل التظلم إليه ، وإن لم يعلم به فهو
موقوف على تظلم أربابه ، ويجوز أن يرجع فيه عند تظلمهم إلى ديوان السلطة فإذا وجد
فيه ذكر قبضتها على مالكها عمل عليه وأمر بردتها إليه ولم يخرج إلى بيته تشهد به وكان
ما واجده في الديوان كافيا .

كما حكى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خرج ذات يوم إلى الصلاة فصادفه رجل ورد
من العين متظلما فقال من البسيط :

تَدْعُونَ حَيْرَانَ مَظْلومًا بِسَائِكُمْ فَقَدْ أَنَاكَ بَعِيدُ الدَّارِ مَظْلومُ
قال مظلامتك ؟ قال غصبي الويلد بن عبد الملك ضيعتي ، قال يامر اجم اثنى
بدفع الصواب فوجد فيه أصنف عبد الله الويلد بن عبد الملك ضيعة فلان ، قال أخرجها
من الدفتر وليكتب برد ضيعته إليه ويطلق له ضعف نفقته : والضرب الثاني من الغصوب
ماتغلب عليها ذوو الأيدي القوية وتصرفو فيه تصرف المالك بالقهر والغلبة ، فهذا
موقوف على تظلم أربابه ولا يتزع من يد غاصبه إلا بأحد أربعة أمور ، إما باعتراف
الغاصب وإقراره ، وإما بعلم والي المظالم فيجوز له أن يحكم عليه بعلمه ، وإما ببيته تشهد
على الغاصب بقصبه أو تشهد للمغصوب منه على ، وإما بظهور الأخبار الذي يتنق عنها
التوطئ ، ولا يختل في الشكوك لأنه لما جاز للشهود أن يشهدوا في الأملاك بظهور
الأخبار كان حكم ولاة المظالم بذلك أحقن :

والقسم السادس : مشارقة الوقوف وهي ضربان : عامة وخاصة ، فاما العامة فيبدأ
بتصفحها وإن لم يكن فيها متظلم ليجريها على سبيلها ويفضيها على شروط واقفها إذا عرفها
من أحد ثلاثة أوجه : إما من دواوين الحكم المذوبيين لحرامة الأحكام ، وإما من دواوين
السلطة على ما جرى فيها من معاملة أو ثبت لها من ذكر وتسمية ، وإما من كتب فيها قدية
تقع في النفس صحتها وإن لم يشهد الشهود بها لأنه ليس يتعين الخصم فيها فكان الحكم أوسع
منه في الوقوف الخاصة .

وأما الوقوف الخاصة فإن نظره فيها موقوف على تظلم أهلها عند النزاع فيها لوقفها

على خصوم متعين فيعمل هند الشاجر فيها على مثبت به الحقوق عند الحكم ولا يجوز أن يرجع إلى ديوان السلطنة ولا إلى ما يثبت من ذكرها في الكتب القديمة إذا لم يشهد بها شهود معذلون.

والقسم السابع : تنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها لضيقهم عن إنفاذها وعجزهم عن الحكم عليه لتعززه وقوه يده أو لعلو قدره وعظم خطره ، فيكون ناظر المظالم أقوى يدا وأنفذ أمراً فينفذ الحكم على من توجه إليه بانتزاع مافق يده أو بإلزامه الخروج مما في ذمته .

والقسم الثامن : النظر فيها عجز عنه الناظرون من الحسنة في المصالح العامة ، كالجهازة
معنكر ضعف عن دفعه والتعمد في طريق عجز عن منه والتحريف في حق لم يقدر على رده
فيأخذهم حق الله تعالى في حيمه ويأمر محملهم على موجبه .

والقسم التاسع : مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع والأعياد واللحظ والجهاد من تقصير فيها وإخلال بشروطها فإن حقوق الله أولى أن تستوفى وفرضه أحق أن تؤدي :

والقسم العاشر : النظر بين المشاجرين والحكم بين المتنازعين فلا يخرج في النظر بهم عن موجب الحق ومقتضاه ، ولا يسوغ أن يحكم بهم إلا بما يحكم به الحكام والقضاة وربما اشتبه حكم المظالم على الناظرين فيها فيجورون في أحكامها ويخرجون إلى الحد الذي لا يسوغ فيها .

والفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه : أحدها أن لنظر المظالم من فضل الهيئة وقوه اليد مالييس للقضاة في كف الخصوم عن التجاحد ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب . والثاني أن نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز فيكون الناظر فيه أفسح مجالاً وأوسع مقالاً . والثالث أنه يستعمل من فضل الإرهاص وكشف الأسباب بالأدلة وشواهد الأحوال اللاحقة ما يضيق على الحكم فيصل به إلى ظهور الحق ومعرفة المبطل من الحق . والرابع أن يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب ويأخذ من بان عدوانه بالتقوم والتهديب . والخامس أن له من التأني في ترداد الخصوم عند اشتباه أمورهم واستهاب حقوتهم ، ليعن في الكشف عن أسبابهم وأحوالهم مالييس للحكم إذا سلّم أحد الخصميين فصل الحكم فلا يسوغ أن يؤخره الحكم ويسمح أن يؤخره وإلى السادس أن له رد الخصوم إذا أعضوا وساطة الأمانة ليحصلوا التنازع بينهم صلحًا عن تراضي ، وليس للقاضي ذلك إلا عن رضى الخصميين بالرد . والسابع أن يفسح

فـ ملـازـمـةـ الـخـصـمـينـ إـذـ وـضـحـتـ أـمـارـاتـ التـجـاحـدـ وـيـاذـنـ فـيـ إـلـزـامـ الـكـفـالـةـ فـيـهاـ يـسـوـغـ فـيـهـ
الـكـفـلـ لـيـقـادـ الـخـصـمـ إـلـىـ النـاـصـفـ وـيـعـدـلـوـاـ عـنـ التـجـاحـدـ وـالـكـاذـبـ ،ـ وـالـثـامـنـ أـنـ يـسـعـ
مـنـ شـاهـدـاتـ الـمـسـتـورـينـ مـاـيـخـرـجـ عـنـ عـرـفـ الـقـضـاءـ فـيـ شـاهـدـةـ الـمـعـدـلـينـ .ـ وـالـثـاسـعـ أـنـ يـجـوزـ لـهـ
إـحـلـافـ الشـهـودـ عـنـ اـرـتـيـابـ بـهـمـ إـذـ بـدـلـواـ أـيمـانـهـمـ طـوـعاـ وـيـسـكـنـرـ مـنـ عـدـدـهـمـ لـيـزـولـ عـنـهـ
الـشـكـ وـيـنـيـ عـنـهـ الـأـرـتـيـابـ ؛ـ وـلـيـسـ ذـلـكـ لـلـحـاـكـ :ـ وـالـعـاـشـرـ أـنـ يـجـوزـ أـنـ يـبـتـدـيـ
الـشـهـودـ وـيـسـأـلـمـ عـماـعـنـهـمـ فـيـ تـنـازـعـ الـخـصـمـ ،ـ وـعـادـةـ الـقـضـاءـ تـكـلـيفـ الـمـدـعـيـ إـحـضـارـ
بـيـنـهـ وـلـاـيـسـعـونـهـ إـلـاـ بـعـدـ مـسـأـلـهـ ؛ـ فـهـنـهـ عـشـرـ أـوـجـهـ يـقـعـ بـهـاـ الفـرـقـ بـيـنـ نـظـرـ الـمـظـالـمـ وـنـظـرـ
الـقـضـاءـ فـيـ التـشـاجـرـ وـالـتـنـازـعـ وـهـمـ فـيـهـ عـدـاـهـمـ مـتـساـبـانـ ،ـ وـسـنـوـضـحـ مـنـ تـعـصـيـلـهـمـاـ مـاـبـينـ
بـهـ إـطـلاقـ مـاـبـينـهـمـاـ مـنـ هـذـهـ الفـرـقـ إـنـ شـاءـ اللـهـ تـعـالـىـ .ـ

(ـ فـصـلـ)ـ وـإـذـ كـانـ كـذـلـكـ لـمـ يـخـلـ حـالـ الدـعـوىـ عـنـ التـرـافـعـ فـيـهـ إـلـىـ وـالـمـظـالـمـ مـنـ
ثـلـاثـةـ أـحـوـالـ :ـ إـمـاـ أـنـ يـقـنـعـهـمـ بـهـاـ مـاـيـقـوـهـاـ أـوـ يـقـنـعـهـمـ بـهـاـ مـاـيـضـعـهـاـ أـوـ تـخـلـوـ مـنـ الـأـمـرـينـ ،ـ
فـإـنـ اـقـنـعـهـمـ بـهـاـ مـاـيـقـوـهـاـ .ـ فـلـمـ اـقـنـعـهـمـ بـهـاـ مـنـ الـقـوـةـ سـتـةـ أـحـوـالـ تـخـلـفـ بـهـاـ قـوـةـ الدـعـوىـ
عـلـىـ التـدـرـيجـ .ـ

فـأـوـلـ أـحـوـالـ :ـ أـنـ يـظـهـرـ مـعـهـاـ كـتـابـ فـيـ شـهـودـ مـعـدـلـونـ حـضـورـ ،ـ وـالـذـىـ يـخـفـضـ نـظـرـ
الـمـظـالـمـ فـمـلـ الدـعـوىـ هـذـهـ شـيـثـانـ :ـ أـحـدـهـمـ أـنـ يـبـتـدـيـ النـاظـرـ فـيـهـ باـسـتـدـعـاءـ الـشـهـودـ لـلـشـاهـدـةـ
وـالـثـانـيـ الـإـسـكـارـ عـلـىـ الـجـاحـدـ بـحـبـ حـالـهـ وـشـاهـدـ أـحـوـالـهـ ،ـ فـإـذـاـ أـحـضـرـ الـشـهـودـ ،ـ فـإـنـ كـانـ
الـنـاظـرـ فـيـ الـمـظـالـمـ مـنـ يـجـلـ قـدـرهـ كـالـخـلـيقـ أـوـ وزـيرـ التـغـوـيـضـ أـوـ أـمـيرـ إـقـليمـ رـاعـيـ مـنـ أـحـوـالـ
الـمـتـازـعـينـ مـاـنـقـضـيـهـ السـيـاسـةـ مـنـ مـبـاشـرـةـ النـاظـرـ بـيـنـهـمـ إـنـ جـلـ قـدـرهـمـ أـوـ دـلـكـ إـلـىـ قـاضـيـهـ
بـعـشـهـدـهـ إـنـ كـانـاـ مـتـوـسـطـينـ أـوـ عـلـىـ بـعـدـهـ إـنـ كـانـاـ خـامـلـينـ .ـ

حـكـيـ أـنـ الـمـأـمـونـ رـضـيـ أـهـلـهـ عـنـهـ كـانـ يـجـلسـ لـلـمـظـالـمـ فـيـ يـوـمـ الـأـحـدـ فـهـنـهـ ذاتـ يـوـمـ مـنـ
جـلـسـ نـظـرـهـ فـلـقـيـتـهـ اـمـرـأـ فـيـ ثـيـابـ رـثـةـ فـقـالتـ مـنـ الـبـسيـطـ :

يـاخـيـرـ مـنـتـصـيفـ يـهـدـيـ لـهـ الرـشـدـ وـيـاـ إـمـاماـ يـوـقـدـ أـشـرـقـ الـبـلـدـ
تـشـكـوـ إـلـيـكـ عـيـدـ الـمـلـكـ أـرـمـلـةـ عـدـاـ عـلـيـهـاـ فـمـاـ تـقـوـيـ يـوـ أـسـدـ
فـابـتـزـ مـنـهـاـ خـيـسـاـعـاـ بـعـدـ مـنـتـبـهـاـ لـمـاـ تـفـرـقـ عـنـهـ الـأـهـلـ وـالـوـلـدـ
فـأـطـرـقـ الـمـأـمـونـ يـسـيرـاـ ثـمـ رـفـعـ رـأـسـهـ وـقـالـ مـنـ الـبـسيـطـ :

مـنـ دـوـنـ مـاـقـلـتـ عـيـلـ الصـبـرـ وـالـجـلـدـ وـأـقـرـحـ الـقـلـبـ هـذـاـ الـخـزـنـ وـالـكـمـ

هذا أوان مسلاة الظفر فانصر في وأخضر الخصم في اليوم الذي أعد المجلس السبت إن يقضى الجلوس لنا أنصفك منه وإن المجلس الأحد فانصرت وحضرت يوم الأحد في أول الناس ، فقال لها المأمون من خصمك ؟
قالت القائم على رأس العباس ابن أمير المؤمنين ، فقال المأمون لقاضيه بجي بن أكثم وقيل لوزيره أحد بن أبي خالد أجلسها معه وانظر بينهما ، فأجلسها معه ونظر بينهما بمحضرة المأمون وجعل كلامها يعلو ، فزجرها بعض حجابه ، فقال له المأمون دعها فإن الحق أنطقها والباطل أخرسه ، وأمر برد ضياعها عليها ، ففعل المأمون في النظر بينهما حيث كان بمشهده ، ولم يباشره بنفسه لما اقتضته السياسة من وجهين : أحددها أنه حكم ربما توجه لولده وربما كان عليه وهو لا يجوز أن يحكم لولده وإن جاز أن يحكم عليه .
والثاني أن الخصم امرأة يجعل المأمون عن حماورتها وابنه من جلالة القدر بالمكان الذي لا يقدر غيره على إلزامه الحق فرد النظر بمشهده منه إلى من كفاه حماورة المرأة في استيفاء الدعوى واستيفاح الحجة ، وبasher المأمون رضى الله عنه تنفيذ الحكم وإلزام الحق :
والحالة الثالثة في قوة الدعوى أن يقتربن بها كتاب فيه من الشهود المدعى من هو غائب ، فالذى يختص بنظر المظالم في مثل هذه الدعوى أربعة أشياء : أحددها إرهاب المدعى عليه فربما تعجل من إقراره بقوة الهيئة ما يغنى عن ساعي البينة . والثانى التقدم بإحضار الشهود إذا عرف مكانهم ولم يدخل الضرر الشاق عليهم . والثالث الأمر بعلازمة المدعى عليه ثلاثة ويجهد رأيه في الزبادة عليها بحسب الحال من قوة الإمارة ودلائل الصحة والرابع أن ينتظر في الدعوى ، فإن كانت مala في الذمة كلفه إقامة كفيل ، وإن كانت عينا قائمة كالعقار حجر عليه فيها حجر لا يرفع به حكم يده ورد استغلالها إلى أمين يحفظه على مستحقه منها فإن تطاولت المدة ووقع الإياس من حضور الشهود جاز لولي المظالم أن يسأل المدعى عليه عن دخول يده مع تجديد إرهابه ، فإن مالك بن أنس رضى الله عنه يرى في مثل هذا الحال سؤال المدعى عليه عن سبب دخول يده وإن لم يره الشافعى وأبو حنيفة ، وللناظر في المظالم استعمال الجائز ولا يلزم الاقتصار على الواجب ، فإن أجب بما يقطع النزاع أقضاه ولا فصل بينهما بمقتضى الشرع .
والحالة الثالثة في قوة الدعوى أن يكون في الكتاب المقتربن بها شهود حضور لكنهم غير مدعىون عند الحكم فالذى يختص بنظر المظالم أن يتقدم الناظر فيها بإحضارهم وسير

أحوالهم فإنه يجدهم على أحوال ثلاثة إما أن يكونوا من ذوى الميئات وأهل الصيانات فالثانية بشهادتهم أقوى وإما أن يكونوا أرذالا فلا يقوى عليهم لكن يقوى بهم إرهاب المقص وإنما أن يكونوا أو ساطا فيجوز له بعد الكشف عن أحوالهم أن يسقفهم بأحلافهم إن رأى قبل الشهادة أو بعدها ثم هو في مساع شهادة هذين الصنفين بين ثلاثة أمور : أحدها إما أن يسمعها بنفسه فيحكم بها وإنما أن يرد إلى القاضى سماعها ليؤديها القاضى إليه ويكون الحكم بها موقعا عليه لأن القاضى لا يجوز أن يحكم إلا بشهادة من ثبتت عنده عدالته وإنما أن يرد سماعها إلى الشهود المعدلين فإن رد إليهم نقل شهادتهم إليه لم يلزمهم استكشاف أحوالهم وإن رد الشهادة عنده بما يصح من شهادتهم لزمهم الكشف عما يقتضى قبول شهادتهم ليشهدوا بها بعد العلم لصحتها ليكون تتنفيذ الحكم بحسبها .

والحالة الرابعة في قوة الدعوى أن يكون في الكتاب المترقب بها شهادة شهود موثق معدلين والكتاب موثق بصحته ، فالذى يختص بنظر المظالم فيه ثلاثة أشياء : أحدها إرهاب المدعى عليه بما يضطره إلى الصدق والاعتراف بالحق : والثانى سؤاله عن دخول يده جواز أن يكون من جوابه ما يتضمن به الحق . والثالث أن يكشف عن الحال من جiran الملك ومن جiran المتنازعين فيه ليتوصل به إلى وضوح الحق ومعرفة الحق ، فإن لم يصل إليه بوحد من هذه الثلاثة ردتها إلى وساطة مختص مطاع له بهما معرفة وبما تنازعاه خبرة بضررها بكثرة التزداد وطول المدى إلى التصادق والتصالح ، فإن أفضى الأمر بيهما إلى أحدهما وإلا بت الحكم على ما يوجه حكم القضاة .

والحالة الخامسة في قوة الدعوى أن يكون مع المدعى خط المدعى عليه بما تضمنته الدعوى فنظر المظالم فيه يقتضى سؤال المدعى عليه عن الخط ؛ وأن يقال له أهذا خطك ، فإن اعترف به يسأل بعد اعترافه عن صحة ما تضمنه ، فإن اعترف بصحته صار مقرأ وألزم حكم إقراره ، وإن لم يعترف بصحته فن ولاة المظالم من حكم عليه بخطه إذا اعترف به وإن لم يعترف بصحته وجعل ذلك من شواهد الحقوق اعتبارا بالعرف ، والذى عليه حقوقهم وما يراه جميع الفقهاء منهم أنه لا يجوز للناظر منهم أن يحكم بمجرد الخط حتى يعرف بصحة ما فيه ، لأن نظر المظالم لا يبيح من الأحكام ماحظره الشرع ونظر المظالم فيه أن يرجع إلى ما يذكره من خطه ، فإن قال كتبه ليقرضني وما أقرضني أو ليدفع إلى منه ما يبعثه وما دفع لهذا مما يفعله الناس أحيانا ، ونظر المظالم في مثله أن يستعمل فيه من الإرهاط بحسب ما يشهد به الحال وتقوى به الأدلة ثم يرد إلى الوساطة ، فإن أفضت

إلى الصلح وإلا بتراضي الحكم بينهما بالتحالف ، وإن أنكر الخط فن ولاة المظالم من يخبر الخط بمخطوطه التي كتبها ويكلفه من كثرة الكتابة ما يمنع من التصريح فيها ثم يجمع بين الخطبين فإذا تشابها حكم به عليه وهذا قول من جمل اعترافه بالخطأ موجبا للحكم به والذى عليه المحققون منهم أنهم لا يفعلون ذلك للحكم عليه ولكن لإرهابه وتكون الشبهة مع إنكاره للخط أضعف منها مع اعترافه به وترفع الشبهة إن كان الخط منافي لخطه ويعود الإرهاب على المدعى ثم برداه إلى الوساطة ، فإن أفضت الحال إلى الصلح وإلا بتراضي الحكم بينهما بالأستان .

والحالة السادسة في قوة الدعوى إظهار الحساب بما تضمنت الدعوى وهذا يكون في المعاملات ، ولا يخلو حال الحساب من أحد أمرين : إما أن يكون حساب المدعى أو حساب المدعى عليه ، فإن كان حساب المدعى فالشبهة فيه أضعف ، ونظر المظالم يرجع في مثله إلى مراعاة نظم الحساب ، فإن كان مختلاً يحصل فيه الإدغال . كان مطراً وهو يضعف الدعوى أشبه منه بقوتها ، وإن كان نظمه متسلقاً ونقطه صحيحاً فالتقى به أعلى فيقتضي من الإرهاب بحسب شواهده ثم يرداً إلى الوساطة ثم إلى الحكم البات ، وإن كان الحساب للمدعى عليه كانت الدعوى به أعلى ، ولا يخلو أن يكون منسوباً إلى خطه أو خط كاته ، فإن كان منسوباً إلى خطه فلنا نظر المظالم فيه أن يسأل عنه المدعى عليه لهذا خطلك ، فإن اعترف به قبل أنعلم ما هو ، فإن أقر بمعرفته قبل أنعلم صحته ، فإن أقر بصحته صار بهذه الثلاثة مقراً بمضمون الحساب فيؤخذ بما فيه ، فإن اعترف بأنه خطه وأنه لم يعلم ما فيه ولم يعترف بصحته فمن حكم بالخط من ولاة المظالم حكم عليه بموجب حسابه وإن لم يعترف بصحته وجعل الثقة بهذا أعلى من الثقة بالخط المرسل ، لأن الحساب لا يثبت فيه قبض مالم يقبض ، والذى عليه المحققون منهم وهو قول الفقهاء أنه لا يحكم عليه بالحساب الذى لم يعترف بصحة ما فيه ، ولكن يقتضى من فضل الإرهاب به أكثر مما اقتضاه الخط المرسل لما تقدم ذكره من الفرق بينهما في العرف ، ثم يرداً بعده إلى الوساطة ، ثم إلى بقى القضاء ، وإن كان الخط منسوباً إلى كاته بدل عنه المدعى عليه قبل سؤال كاته ، فإن اعترف بما فيه أخذ به وإن لم يعترف يسأل عنه كاته ، فإن أصر على ضعفت الشبهة يإنكاره وأرهب إن كان متهماً ولم يرهب إن كان مأموراً ، فإن اعترف وبصحته صار شاهداً به على المدعى عليه فيحكم عليه بشهادته إن كان عدلاً ، ويقضى بالشاهد والمدين إما مذهبها وإما ميسنة تقتضياً شاهدة الحال ، فإن شاهد الحال في

المظالم تأثيراً في اختلاف الأحكام ، ولكل حال منها في الإرهاب حد لا يتجاوزه تمييزاً بين الأحوال بمقتضى شواهدنا .

(فصل) وأما إن افترن بالدعوى ما يضيقها ، فلما افترن بها من الضعف ستة أحوال تناف أحوال القوة ، فينتقل الإرهاص بها من جنبة المدعى عليه إلى جنبة المدعى .

فالحالة الأولى : أن يقابل الدعوى بكتاب شهوده حضور معدلون يشهدون بما يوجب
بطلان الدعوى وذلك من أربعة أوجه : أحدها أن يشهدوا عليه ببيع مادعاه . والثاني أن
يشهدوا على إقراره بأن لاحق له فيها ادعاء . والثالث أن يشهدوا على إقرار أبيه الذي ذكر
انتقال الملك عنه أنه لاحق له فيها ادعاء . والرابع أن يشهدوا للمدعى عليه بأنه مالك لما
ادعاه عليه فيطاً دعواه بهذه الشهادة ويعتبر نظر المظالم تأدبيه بحسب حاله ، فإن ذكر
أن الشهادة بالابتعار كانت على سبيل رهب وإجلاء ، وهذا قد يغسله الناس أحياناً فينظر
في كتاب الابتعار ، فإن ذكر فيه أنه من غير رهب ولا إجلاء ضعفت شبهة هذه الدعوى ،
وإن لم يذكر ذلك فيه قويت شبهة الدعوى وكان الإلزام في الجهتين بعنتصري شواهد
الحالين ورجع إلى الكشف بالمحاورين والخلطاء ، فإن بيان ما يوجب العدول عن ظاهر
الكتاب عمل عليه ، وإن لم بين كان إمضاء الحكم بما شهد به شهود الابتعار أحق فإن سأل
إحلاف المدعى عليه بأن ابتعاره كان حقاً ولم يكن على سبيل الرهب والإجلاء فقد اختلف
الفقهاء في جواز إحلاله لاختلاف مادعاه ، فذهب أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة من
 أصحاب الشافعى إلى جواز إحلاله لاحتياط مادعاه وإمكانه ، واستنبط آخرون من أصحاب
الشافعى من إحلاله ، لأن متقدم إقراره مكتوب لما خر دعواه . ولو أدى المظالم أن يعمل من
القوانين بما تقتضيه شواهد الحالين ، وهكذا لو كانت الدعوى ديناً في النمة فأظهر المدعى
عليه كتاب براءة منه فذكر المدعى أنه أشهد على نفسه قبل أن يقبض ولم يقبض كان
إحلاف المدعى عليه على متقدم ذكره .

والحالة الثانية : أن يكون شهود الكتاب المقابل للدعوى عدولًا غائبين ، فهذا على ضربين : أحدهما أن يتضمن إمسكاره اعتراضًا بالسبب كقوله لاحق له في هذه القضية لأنني ابتعتها منه ودفعت ثمنها إليه وهذا كتاب عهدي بالإشهاد عليه فيصير المدعى عليه مدعياً بكتاب قد غاب شهوده فيكون على مامضى قوله زيادة يد وتصرف فتكون الأئمة أقوى وشاهد الحال أظهر ، فإن لم يثبت بها الملك فيربهما بحسب ما يقتضيه شواهد أحوالهما ويأمر بإلزام الشهود إن أمكن ويضرب لحضورهم أجلاً يردها فيه

إلى الوساطة ، فإن أفضت إلى صلح عن راض استقر به الحكم وعدل عن استئناف الشهادة إذا حضرت وإن لم ينبرم ما بينهما صلحاً معن في الكشف عن جرائمها وجبران الملك وكان لوال المظلوم رأيه في زمان الكشف في خصلة من ثلاث : منها ما يؤديه اجتهاده إليه بحسب الأدلة وشواهد الأحوال . إما أن يرى انزعاع القضية من يد المدعى عليه وتسليمها إلى المدعى إلى أن تقوم عليه بينة بالبيع ، وإما أن يسلمها إلى أمين تكون في يده ويحفظ استغلالها على مستحقه ، وإما أن يقرها في يد المدعى عليه وي مجر عليه فيما وينصب أنها يحفظ استغلالها ويكون حالها على ما يراه والي المظلوم في خصلة من هذه الثلاث ما كان راجياً أحداً من بنين : من ظهور الحق بالكشف ، أوحضور الشهود للأداء ، فإن وقع الإياب منهم بت الحكم بينهما ، فلو سأله المدعى عليه إخلاف المدعى أحلف له وكان ذلك بما للحكم بينهما . والضرب الثاني أن لا يتضمن إنكاره اعترافاً بالسبب ويقول هذه القضية لي لا حق لها المدعى فيها وتكون شهادة الكتاب على المدعى على أحد وجهين : إما على إقراره بأن لاحق له فيها ، وإما على إقراره بأنها ملك المدعى عليه فالقضية مقررة في يد المدعى عليه لا يجوز انزعاعها منه ، فأما الحجر عليه فيما وحفظ استغلالها مدة الكشف والوساطة فتعتبر بـشواهد أحوالها واجتهاد والي المظلوم فيما يراه بينهما إلى أن يثبت الحكم بينهما .

وأما الحالة الثالثة : أن شهود الكتاب المقابل ذلك المدعى حضور غير معدلين فيراعي والي المظلوم فيما مقدمنا في جنبة المدعى من أحوالهم الثلاث ، ويراعي حال إنكاره هل يتضمن اعترافاً بالسبب أم لا ، فيعمل والي المظلوم في ذلك بما قدمناه تعويلاً على اجتهاده برأيه في شواهد الأحوال .

والحالة الرابعة : أن يكون شهود الكتاب موقي معدلين فليس يتعلق به حكم إلا في الإرهاب العزف الذي يقتضي فصل الكشف ثم في بت الحكم على ما تضمنه الإنكار من الاعتراف بالسبب أم لا .

والحالة الخامسة : أن يقابل المدعى عليه بخط المدعى بما يوجب إكذابه في الدعوى فيعمل بما قدمناه في الخط ويكون الإرهاب معتبراً بشاهد الحال .

والحالة السادسة : أن يظهر في الدعوى حساب يقتضي بطلان الدعوى فيعمل فيه بما قدمناه في الحساب ويكون الكشف والإرهاب والمطولة معتبراً بـشواهد الأحوال ثم يبت الحكم بعد الإياب قطعاً للنزاع .

(فصل) ثالما إن تجردت الدعوى عن أسباب القوة والضعف فلم يقترب بها ما يقتربها ولا ما يقتربها فنظر المظالم يقتضي مراعاة حال المتنازعين في غلبة الظن ، ولا يخلو حالها فيه من ثلاثة أحوال : أحدها أن تكون غلبة الظن في جنحة المدعى . والثاني أن تكون في جنحة المدعى عليه . والثالث أن يعتدلا فيه والذى يؤثره غلبة الظن في إحدى الجهتين في جنحة المدعى عليه ، فإن كانت غلبة الظن في جنحة المدعى وكانت الريبة متوجة إلى المدعى الظنون الثالثة ، فإن كانت غلبة الظن في جنحة المدعى و كانت الريبة متوجة إلى المدعى عليه ، فقد يكون من ثلاثة أوجه : أحدها أن يكون المدعى مع خلوه من حجة يظهر بها مضمون اليد مستلان الجنة والمدعى عليه ذا بأس وقدرة ، فإذا أدعى عليه غصب دار أوضاعية غالب في الظن أن مثله مع لينه واستضعافه لا يتجوز في دعواه على من كان ذا بأس وذا سطوة . والثاني أن يكون المدعى مشهورا بالصدق والأمانة والمدعى عليه مشهورا بالكذب والخيانة فيغلب في الظن صدق المدعى في دعواه . والثالث أن تتساوى أحوالهما غير أنه قد عرف للمدعى يد متقدمة وليس يعرف للدخول يد المدعى عليه سبب حدوث غالذى يقتضيه نظر المظالم في هذه الأحوال الثلاثة : شيتان : أحدهما إرهاب المدعى عليه لتوجيه الريبة . والثانى سؤاله عن سبب دخول يده وحدودت ملكه فإن مالك بن أنس رضى الله عنه يرى ذلك مذهبًا في القضاء مع الارتكاب فكان نظر المظالم بذلك أولى وربما أنف المدعى عليه مع علو منزلته عن مساواة خصمه في المحاكمة فينزل عما في يده خصمه عفوا ، كالذى حكمى عن مومى المادى . جلس يوما للمظالم وعمارة بن حزة قائم على رأسه وله منزلة فحضر رجل في جلة المتظلمين يدعى أن عمارة غصب ضيعة له فأمره المادى بالجلوس معه للمحاكمة ، فقال يا أمير المؤمنين إن كانت الضيعة له فما أعارضه فيها ، وإن كانت لي فقد وهبها له وما أبيع موضعى من مجلس أمير المؤمنين . وربما تلطىف والى المظالم في إيصال المتظلم إلى حقه بما يحفظ معه حشمة المطلوب أو مواضعه المطلوب على ما يحفظ به حشمة نفسه أن يكون منسوبا إلى تجيف ومنع من حق كالذى حكاه عون بن محمد أن أهل نهر المرغاب بالبصرة خاصموا فيه المهدى إلى قاضيه عبد الله بن الحسن العنبرى فلم يسلمه إليهم ولا المادى بعده ثم قام الرشيد فنظلهموا إليه وجعفر بن يحيى ناظر في المظالم فلم يرده لهم فاشتراء جعفر بن يحيى من الرشيد بعشرين ألف درهم ووحبه ثم وقال إنما فعلت هذا لتعلموا أن أمير المؤمنين لحقه خاج فيه وأن عبده اشتراه فوهبه لكم فقال فيه أشجع السلى من الكامل :

رَدَ السَّبَاحَ يُذِي يَدِيهِ وَأَهْلَهَا فِيهَا بَتَزَلَّةٍ السَّمَاكُ الْأَغْرِى
قَدْ أَبْقَنُوا بِلَهْوِهَا وَهَلَّا كُوْنُ وَالْدُّفْرُ يَرْعَاهَا بِبَزْمٍ أَغْضَلَ
فَاقْتَسَكَهَا كُمْ وَمُمْ مِنْ دَفْرِهِمْ بَيْنَ الْجَرَانِ وَبَيْنَ حَدَّ الْكَلْكَلِ
مَا كَانَ يُرْجِي غَيْرُهُ لِفَكَارِكَاهَا إِنَّ الْكَرِيمَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُغْبِلِ

فاحتمل ما فعله جعفر بن يحيى من أن يكون قد ابتدأه من نفسه تزيها للرشيد عن التعلم فيه واحتمل أن يكون الرشيد واسعه على هذا الكلا بحسب أبوه وأخوه إلى جور في حق وهو الأشبه ولا يهم ما كان فقد عاد به الحق إلى أهله مع حفظ الحشمة وحسم البذلة أما إن كان غلبة الظن في جهة المدعى عليه ، فقد يكون ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها أن يكون المدعى مشهورا بالظلم والخيانة والمدعى عليه مشهورا بالتصفية والأمانة . والثاني أن يكون المدعى دنياً مبتداً والمدعى عليه نزهاً منصوباً فيطلب إحلاله قصداً بذلك . والثالث أن يكون للدخول بد المدعى عليه سبب معروف وليس يعرف لدعوى المدعى سبب فيكون غلبة الظن في هذه الأحوال الثلاثة في جهة المدعى عليه والريبة متوجهاً إلى المدعى ، فذهب مالك رحمه الله إن كانت دعواه في مثل هذه الحالة بغير قاعدة لم يسمعها إلا بعد ذكر السبب الموجب لها وإن كانت في مال النمة لم يسمعها إلا بعد أن يقيم المدعى بينة أنه كان بينه وبين المدعى عليه معاملة ، والشافعى وأبو حنيفة رضى الله عنهما لا يربون ذلك في حكم القضاة .

فأما نظر المظالم الموضوع على الأصلاح فعل الخاير دون الواجب ، فيسوغ فيه مثل هذا عند ظهور الريبة وقصد العناid ، ويبالغ في الكشف بالأسباب المؤدية إلى ظهور الحق ويصون المدعى عليه بما اتسع في الحكم ، فإن وقع الأمر على التحالف وهو غاية الحكم البات الذى لا يجوز دفع طالب عنه في نظر القضاء ولا في نظر المظالم إذا لم يكفله عنه الإرهاib ولا الوعظ ، فإن فرق دعاويه وأراد أن يخلف في كل مجلس منها على بعضها قصداً لإعانته وبذاته فالذى يوجه حكم القضاة أن لا يمتنع من تعيس الدعاوى وتفرق الأمانات ، والذى ينتجه نظر المظالم أن يؤمر المدعى بجمع دعاويه عند ظهور الإعتنات منه وإحلال الخصم على جميعها مبيناً واحدة ، فاما إن اعتدت حال المتنازعين وتقابلت بينة المتشاجرين ولم يترجع حجة أحدهما بأمارته أو ظنة فينبني أن يساوى بينهما في العذة وهذا مما يتحقق عليه القضاء وولاية المظالم ثم يختص ولاية المظالم بعد العذة بالإرهاب لمنه عملاً لتساوهما ، ثم بالكشف عن أصل الدعوى وانتقال الملك ، فإن ظهر بالكشف

ما يُعرف به الحق منها عمل عليه ؛ وإن لم يظهر بالكشف ما ينفصل به تنازعهما ردها إلى وساطة وجوه العبران وأكابر العثار ، فإن يجز بها ما بينهما وإلا كان فصل القضاء بينهما وهو خاتمة أمرها بحسب ما يراه من المباشرة لبت الحكم والاستئناف فيه . وربما ترافق إلٰ ولادة المظالم في غواص الأحكام ومشكلات الخصم ما يرشده إليه الجلسات ويفتحه عليه العلماء فلا يذكر منهم الابتداء ولا يستكثر أن يعمل به في الاتهام ، كالمذى رواه الزبير بن بكار عن إبراهيم الحرى بن محمد بن معن الغفارى أن امرأة أنت عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله ، فقال لها نعم الزوج زوجك ، فجعلت تكرر عليه القول وهو يذكر عليها الجواب ؛ فقال له كعب بن سور الأسدى يا أمير المؤمنين بهذه امرأة تشکر زوجها في مبادعته إياها عن فراشه ، فقال له عمر رضى الله عنه كما فهمت كلامها فاقض بينهما ، فقال كعب على بزوجها فأنى به ، فقال إن امرأتك تشکوك فقال أقى طعام أو شراب ؟ قال لا ، في واحد بينهما ، فقالت المرأة من الرجل :

يَا أَيُّهَا التَّائِبِيُّ الْحَكِيمُ رُشْدُهُ الْمُهَنْدِيُّ خَلِيلِيْ عَنْ فِرَائِشِيْ مَسْجِدُهُ
زَهْدُهُ فِي مَضْجِعِي تَعْبُدُهُ نَهَارَهُ وَلَيْلَهُ مَا يَرْقُدُهُ
فَلَسْتُ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ أَحَدُهُ فَاقْضِي الْقَضَايَا كَعْبُ لَا تَرْدُدُهُ
فقال الزوج من الرجل :

زَهْدِي فِي فَرْشِهَا وَفِي الْمِجَانِ أَنْتِ امْرُؤُ أَذْهَلَنِي مَا فَدَ نَزَلَ
فِي سُورَةِ النُّخْلِ وَفِي السَّبْعِ الطُّوْلِ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَخْوِيفُ جَلَّ
فقال كعب من الرجل :

إِنْ كُمَا حَقًا عَلَيْكَ يَارَجُلُ نَصِيبُهَا فِي أَرْبَعِ مِنْ عَقْلِ
فَأَعْطِهَا ذَاكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعِلْمَ

ثم قال له إن الله قد أحل لك من النساء مئتي وثلاث وربع ، فلما تلاه ثلاثة أيام ولما يليهن تعبد فيهن ربكم ولها يوم وليلة ، فقال عمر لكتاب رضى الله عنه ، والله ما أدرى من أى أمر يركب أمن فهمك أمرها ؟ أم من حككت بينهما ؟ إذهب فقد ولبيك القضاء بالبصرة ، وهذا القضاء من كعب والإقضاء من عمر رضى الله عنه كان حسقا بالجائز

دون الواجب ، لأن الزوج لا يلزمه أن يقسم للزوجة الواحدة ولا يجبرها إلى الفراش إذا أصابها دفعة واحدة ، فدل هذا على أن لواى المظالم أن يحكم بالجائز دون الواجب .

فصل في توقعات الناظر في المظالم

وإذا وقع الناظر في المظالم في قصص المتظلمين إليه بالنظر بينهم لم يمثل حال الموقف إليه من أحد أمرىء إما أن يكون واليًا على م الواقع به إليه أو غير وال عليه ، فإن كان والياً عليه كتوقيعه إلى القاضي بالنظر بينهما ، فلا يخلو حال مانضمنه التوقع من أحد أمرىء إما أن يكون إذاً بالحكم أو إذاً بالكشف والوساطة فإن كان إذاً بالحكم جاز له الحكم بينهما بأصل الولاية ويكون التوقع تأكيداً لا يؤثر فيه تصور معانبه ، وإن كان إذاً بالكشف للصورة أو التوسط بين الخصمين ، فإن كان في التوقع بذلك نبيه عن الحكم فيه لم يكن له أن يحكم بينهما وكان هذا النهي عزل له عن الحكم بينهما وهو على عموم ولائته فيما عداه لأنه لما جاز أن تكون الولاية نوعين عامة وخاصة جاز أن يكون العزل نوعين عاماً وخاصة ، وإن لم ينفعه في التوقع عن الحكم بينهما حين أمره بالكشف ، فقد قبل يكون نظره على عمومه في جواز حكمه بينهما لأن أمره ببعض ما إليه لا يكون منعًا من غيره ، وقد قبل بل يكون منعًا من غيره ، وقد قبل بل يكون منعًا من الحكم بينهما مقصوراً على مانضمنه التوقع من الكشف والوساطة ، لأن فحوى التوقع دليل عليه ثم ينظر ، فإن كان التوقع بالوساطة لم يلزمه إنهاء الحال إليه بعد الوساطة وإن كان بكشف الصورة لزم إنهاء حالها إليه لأنه استخار منه فلزمه إيجابه عنه فهذا حكم توقيعه إلى من له الولاية .

وأما الحالة الثانية . وهو أن يوقع إلى من لا ولادة له كتوقيعه إلى قفيه أو شاهد فلا يخلو حال توقيعه من ثلاثة أحوال : أحدها أن يكون بكشف الصورة ، والثاني أن يكون بالوساطة . والثالث أن يكون بالحكم ، فإن كان التوقع بكشف الصورة فعله أن يكشفها وينهى منها ما يصبح أن يشهد به ليجوز للموقع أن يحكم به ، فإن أنهى مالاً يجوز أن يشهد به كان خيراً لا يجوز أن يحكم به الموقع ولكن يجعله في نظر المظالم من الأمارات التي يغلب بها حال أحد الخصمين في الإرهاب وفضل الكشف ، فإن كان التوقع بالوساطة توسط بينهما ولم يقف على مانضمنه التوقع من تحصيص الوساطة ، لأن الوساطة لافتقد إلى تقليد ولا ولائية وإنما يغدو التوقع بالوساطة تعين الوسيط باختيار الموقع وقد الخصمين إليه اختيارة ، فإن أفضت الوساطة إلى صلح الخصمين لم يلزمه إنهاؤها وكان شاهداً فيها متى استدعى للشهادة أدتها ، وإن لم تفض الوساطة إلى صلحهما كان

شاهدًا عليهم فيها اعترافا به عنده يؤديه إلى الناظر في المظالم إن عاد الخصم إلى التظلم ، ولا يلزمه أداؤه إن لم يعود وإن كان التوقيع بالحكم بينهما ، فهذه ولادة يراعى فيها معانى التوقيع ليكون نظره محمولا على موجبه .

وإذا كان كذلك فلتتحقق حالان : أحدهما أن يحال به على إجابة الخصم إلى ملتمسه فيعتبر فيه حينئذ مسألة الخصم في ظلامته ويصير النظر مقصورا عليه ، فإن سأل الوساطة أو الكشف للصورة كان التوقيع موجبا له وكان النظر مقصورا عليه ، وسواء خرج التوقيع خرج الأمر كقوله أجبه إلى ملتمسه ، أو خرج خرج الحكایة كقولهرأيك في إجابته إلى ملتمسه كان موقعا لأنه لا يقتضي ولادة يلزم حكمها فكان أمرها أخف فإن سأل المظالم في قصته الحكم بينهما فلا بد أن يكون الخصم مسمى والمحصومة مذكورة لتصح الولاية عليها ، فإن لم يسم الخصم ولم تذكر المحصومة لم تصح الولاية لأنها ليست ولاية عامة فيحمل على عمومها ولا خاصة للجهيل بها وإن سمي رافع القصة خصمه وذكر خصومته نظر في التوقيع بإجابته إلى ملتمسه ، فإن خرج خرج الأمر فوقع وأجاب إلى ملتمسه وعمل بما تمهس صحت ولادته في الحكم بينهما ، فهذا التوقيع ، وإن خرج خرج الحكایة للحال فوق رأيك في إجابته إلى ملتمسه فهذا التوقيع خارج في الأعمال السلطانية خرج الأمر والعرف باستعماله فيها معتاد ، فأمام الأحكام الدينية فقد جوزته طائفة من الفقهاء اعتبار في العرف فيه وصحت به الولاية ، ومنعت طائلة أخرى من جوازه وانعداد الولاية به حتى يقتنون به أمر تعتقد ولادته به اعتبارا بمعانى الألفاظ ، فلو كان رافع القصة سأل التوقيع بالحكم بينهما فوق إجابته إلى ملتمسه من يعتبر العرف المعتاد صحت الولاية بهذا التوقيع ، وإن وقع من يعتبر معانى الألفاظ لم تصح به الولاية لأنه سأل التوقيع بالحكم لم يسأل الحكم . والحالة الثانية في التوقيعات أن يحال فيه على إجابة الخصم إلى مسألة ويستأنف فيه الأمر بما تضمنه فيصير ماتضمنه التوقيع هو المعتبر في الولاية ، فإن كان كذلك فإنه ثلاثة أحوال : حال كمال . وحال جواز . وحال يخلو عن الأمرين . فأمام الحالة التي يكون التوقيع فيها كمال في صحة الولاية فهو أن يتضمن شيئاً : أحدهما الأمر بالنظر . والثاني الأمر بالحكم فيذكر فيه أنظر بين رافع هذه القصة وبين خصمه وأحكم بينهما بالحق ووجب الشرع ؟ فإذا كان كذلك جاز لأن الحكم لا يكون إلا بالحق الذي يوجه حكم الشرع ، وإنما يذكر ذلك في التوقيعات وصفا لشرط ، فإنما كان هذا التوقيع جاماً لشدين الأمرين من النظر والحكم فهو

التوقيع الكامل وبصحبـه التـقـلـيد والـولـاـيـة. وأـمـاـ الـحـالـةـ الـتـيـ يـكـوـنـ فـيـهـ التـوـقـعـ جـازـاـ مـعـ قـصـورـ عنـ حـالـ الـكـمالـ فـهـوـ أـنـ يـتـضـمـنـ الـأـمـرـ بـالـحـكـمـ دـوـنـ النـظـرـ فـيـذـكـرـ فـيـ توـقـعـهـ أحـكـمـ بـينـ رـافـعـ هـذـهـ القـصـةـ وـبـيـنـ خـصـمـهـ أـوـ يـقـولـ اـقـضـ بـيـنـهـماـ فـتـصـحـ الـولـاـيـةـ بـذـلـكـ لـأـنـ الـحـكـمـ وـالـقـضـاءـ بـيـنـهـماـ لـاـ يـكـوـنـ إـلـاـ بـعـدـ تـقـدـمـ النـظـرـ فـسـارـ الـأـمـرـ بـهـ مـتـضـمـنـاـ لـلـنـظـرـ لـأـنـهـ لـاـ يـخـلـوـ مـنـهـ.

وـأـمـاـ الـحـالـةـ الـتـيـ يـكـوـنـ التـوـقـعـ فـيـهـ خـالـيـاـ مـنـ كـمـاـ وـجـواـزـ فـهـوـ أـنـ يـذـكـرـ التـوـقـعـ أـنـظـرـ بـيـنـهـماـ ،ـ فـلـاـ تـنـعـقـدـ بـهـذـاـ التـوـقـعـ لـاـيـةـ لـأـنـ النـظـرـ بـيـنـهـماـ قـدـ يـعـتـمـلـ الـوـاسـطـةـ الـجـائـزةـ وـيـعـتـمـلـ الـحـكـمـ الـلـازـمـ وـهـاـ فـيـ الـاحـتـالـ مـوـاـءـ ،ـ فـلـمـ تـنـعـقـدـ بـهـ مـعـ الـاحـتـالـ فـيـ الـلـوـلـاـيـةـ ،ـ وـإـنـ ذـكـرـ فـيـ أـنـظـرـ بـيـنـهـماـ بـالـحـقـ ،ـ فـقـدـ قـيـلـ إـنـ الـلـوـلـاـيـةـ بـهـ مـنـعـقـدـةـ ،ـ لـأـنـ الـحـقـ مـالـزـمـ ،ـ وـقـيـلـ لـاـ تـنـعـقـدـ بـهـ ،ـ لـأـنـ الـبـلـحـ وـالـوـاسـطـةـ حـقـ وـإـنـ لـمـ يـلـزـمـهـ وـاقـهـ أـعـلـمـ.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram,serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum,dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat;
- b. bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut,dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa,dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat;
- c. bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan,dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan,perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional;
- d. bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan,kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat;
- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut,dan sesuai pula dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, perlu dibentuk Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24,dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 dihubungkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Pasal 49

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 - Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Pasal 54

- Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
- Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.
- Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
- Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
- Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

Pasal 83

- Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:
 - pihak yang membela haknya; atau
 - peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang.
- Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri,tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- c. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Pasal 6

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Pasal 25

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.
2. Hakim adalah hakim pada pengadilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan tinggi tata usaha negara.
3. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
6. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
7. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

8. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.
12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan pelindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undangundang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 21

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.

- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
- (3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.
- (6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Pasal 53

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap	:	Muhamad Fatih Nasrullah
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bogor, 4 Desember 1994
Alamat Kos	:	Kp. Sapan GK1/547B, RT 023 RW 07, Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta
Alamat Rumah	:	Villa Ciomas Indah G17/20, Desa Ciomas Rahayu, Kec. Ciomas, Kab. Bogor. Jawa Barat
Email	:	fatihtea@gmail.com
No. HP	:	08568830001
Blog	:	fatihnasrullah.blogspot.com
Nama Ayah	:	M. Adhi Maretnas Harapan
Pekerjaan Ayah	:	Wiraswasta
Nama Ibu	:	Noor Hendrawati
Pekerjaan Ibu	:	Ibu Rumah Tangga
Riwayat Pendidikan Formal :		
1.	SD Negeri 8 Serang	(2000-2001)
2.	SDIT Raudhatul Jannah Cilegon	(2001-2003)
3.	MI Mathla'ul Anwar Pusat Menes	(2003-2006)
4.	SMP Daar El-Falaah Pandeglang	(2006-2009)
5.	MAN 2 Bogor	(2009-2010)
6.	SMAIT Insantama Bogor	(2010-2013)
7.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	(2013-2017)
Riwayat Organisasi :		
1.	Ketua OSIS SMAIT Insantama	(2011-2012)
2.	Wakil Ketua Ekstrakurikuler Jurnalistik SMAIT Insantama	(2011-2012)
3.	Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi Ikatan Alumni Insantama	(2014-2017)
4.	Ketua Gema Pembebasan Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	(2015-2016).

Riwayat Kegiatan :

1. The Leadership and Management Training 2012 University Malaya, 25 November-1 Desember 2012, Kuala Lumpur, Malaysia.
2. Sekolah Pemikiran Islam (SPI) Angkatan V, Gema Pembebasan Komisariat UIN Sunan Kalijaga, 14-15 Mei 2016, Hotel Delta Yogyakarta.

